RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN LEKSONO
TAHUN 2025 – 2029

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN LEKSONO

Jl. Manggis No. 01 Leksono
Wonosobo Jawa Tengah 56362
Telepon (0286) 3320303

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Puji Syukur Ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME atas rahmat dan karunianya, Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 dapat disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan lima tahun ke depan.

Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun mengacu pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), kebijakan nasional, serta kebutuhan dan permasalahan sektoral yang ada. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikator kinerja yang terukur.

Penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi berbagai pihak, baik dari unsur internal dinas, perangkat daerah lainnya, maupun masyarakat. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih atas kontribusi dan masukan yang diberikan selama proses penyusunan.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Merupakan harapan dan semangat bersama agar Renstra Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 ini dapat terlaksana dengan optimal dalam rangka berkontribusi secara nyata.

Wonosobo, 20 September 2025
CAMAT LEKSONO
KABUPATEN WONOSOBO

NGADENAN HADI PRIYONO,S.Sos.
Pembina Tk I
NIP. 196803231991031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I..... 1
PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan..... 4
BAB II..... 7
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 7
2.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan 13
2.2 Struktur Organisasi Kecamatan 16
2.3 Sumber Daya Manusia Aparatur 16
2.4 Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan 18
2.5 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 22
2.6 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah..... 29
2.7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 30
Perangkat Daerah..... 30
2.8 Isu Strategis Sesuai Lingkungan Dinamis (Isu Nasional, Regional, ... 33
Kabupaten) 33
BAB III..... **Error! Bookmark not defined.**
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... **Error! Bookmark not defined.**
3.1 Visi dan Misi RPJMD 34
3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD..... 36
3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra 39
3.4 Strategi dan Arah Kebijakan 43
3.5 Arah Kebijakan Tahunan 47
BAB IV 49
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 49
4.1 Rencana Program 49
4.2 Program Kegiatan Prioritas 88
4.3 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..... 90
4.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)..... 90
4.3.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)..... 94
BAB V..... 98

PENUTUP 98
LAMPIRAN 99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang). Perencanaan Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo tahun 2025 – 2029, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Leksono yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Leksono mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi di dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029.

Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Leksono dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

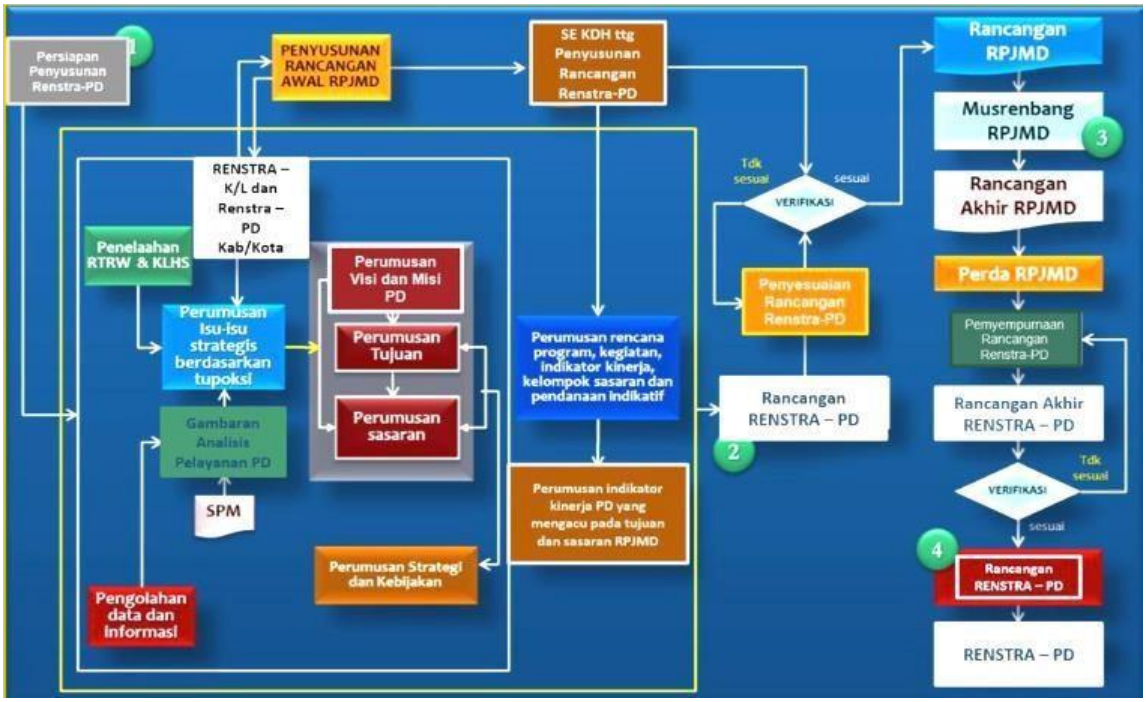
Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni :

1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang?;
2) Bagaimana cara mencapainya? dan;
3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai?.

Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Leksono Tahun 2025-2029 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Gambar 1.1.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Leksono



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan, sbb :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi di Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 8 Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023: (Perubahan atas Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021), dan diubah kembali dengan Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024: (Perubahan Kedua atas Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023–2043 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045;Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023–2043 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo;
21. Surat Edaran Nomor 000.7.2.2/0556/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2030.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Leksono disusun dengan maksud menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Leksono dan memberikan pedoman bagi perangkat Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo ini, antara lain adalah :

1) Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun (2025-2029).
2) Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
3) Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua Stakeholder (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Leksono.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Kecamatan Kecamatan Leksono Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. Dengan susunan sub bab sebagai berikut :

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan Gambaran umum kondisi Kecamatan Sapuran meliputi konteks wilayah pengembangan dan RTRW, Tugas dan Fungsi Kecamatan, Struktur Organisasi, Sumber daya Aparatur, Sarana dan Prasarana, Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan, Kelompok Sasaran Pelayanan, Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan serta Isu Strategis Kecamatan. Dengan susunan sub bab sebagai berikut :

2.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan
2.2 Struktur Organisasi Kecamatan
2.3 Sumber Daya Manusia Aparatur
2.4 Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan
2.5 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
2.6 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
2.8 Isu Strategis Sesuai Lingkungan Dinamis (Isu Global, Nasional, dan Regional)

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan visi dan misi Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renstra, Strategi dan arah kebijakan serta arak kebijakan tahunan. Dengan susunan sub bab sebagai berikut :

3.1 Visi dan Misi RPJMD
3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan
3.4 Arah Kebijakan Tahunan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan Rencana Program, Program Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah serta Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah berdasarkan IKU dan IKK. Dengan susunan sub bab sebagai berikut :

4.1 Rencana Program
4.2 Program Kegiatan Prioritas
4.3 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)
4.3.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan Renstra Kecamatan tahun 2025-2029 dan saran masukan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Dengan susunan sub bab sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan
5.2 Saran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

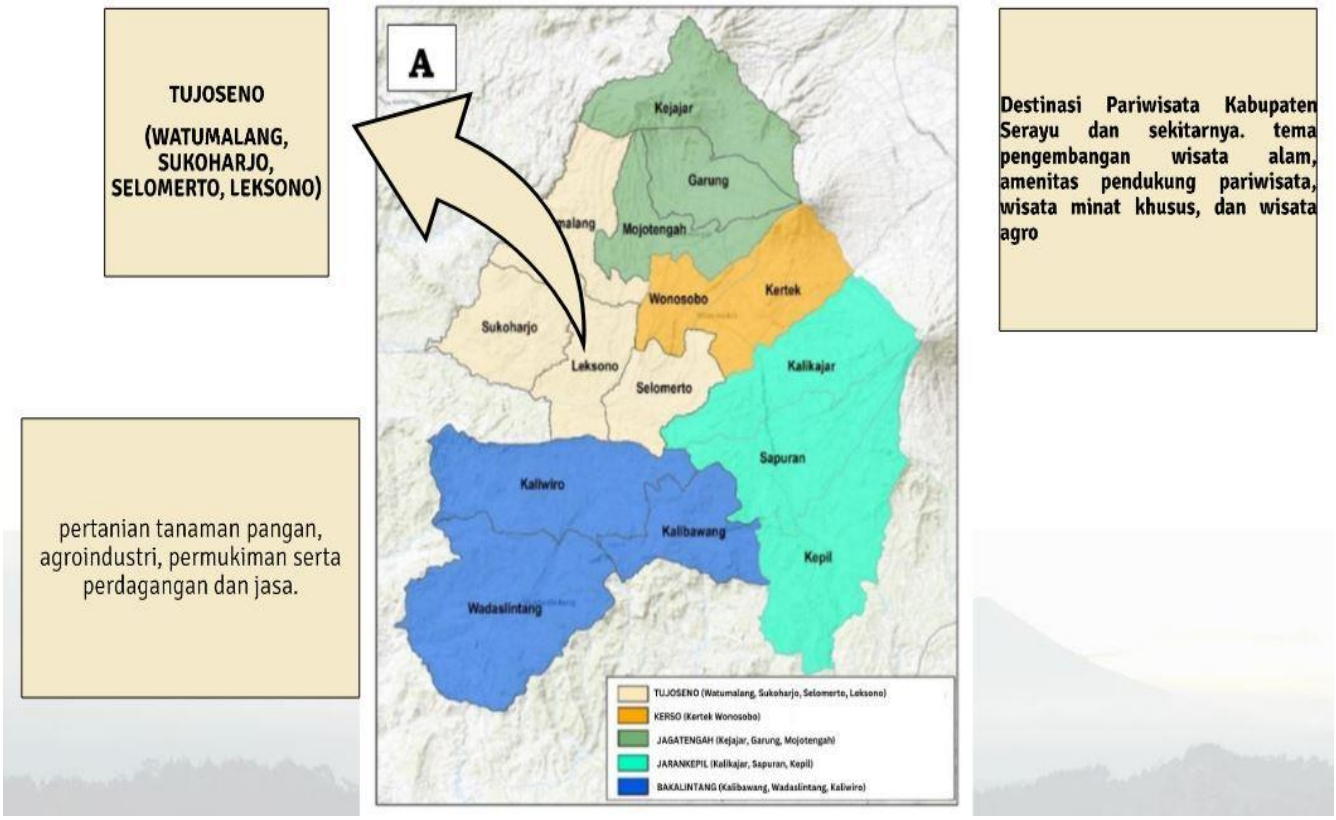
Kecamatan Leksono merupakan daerah pegunungan dengan luas wilayah 4.407,00 ha, atau 4,48% dari luas Kabupaten Wonosobodan 132 km dari ibu kota Provinsi Jawa Tengah (Semarang). KecamatanLeksono merupakan salah satu dari 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo,terletak antara 7° 20'40" sampai 7° 26' 47" Lintang selatan (LS) dan 109° 53'28" Bujur Timur (BT), dengan batas- batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah selatan : Kecamatan Kaliwiro;
2. Sebelah utara: Kecamatan Watumalang;
3. Sebelahtimur: Kecamatan Selomerto;
4. Sebelah barat : Kecamatan Sukoharjo dan Kabupaten Banjarnegara;

Sesuai dengan keadaan daerah yang berbukit-bukit Kecamatan Leksono mempunyai ketinggian 400 s.d 800 m diatas permukaan laut dengan suhu udara antara 24 – 26 °C. Kecamatan Leksono beriklim tropis dengan dua musim dalam setahunnya yaitu musim kemarau dan musim penghujan dengan rata – rata curah hujan/tahun : 3.376,160 mm. Berdasarkan hasil pemetaan tentang jenis tanah di wilayah Kecamatan Leksono dapat dibedakan menjadi dua macam jenis tanah yaitu tanah podsilid, dimana di Kecamatan Leksono hanya terdapat sekitar 14% dari keseluruhan jenis tanah dan jenis tanah dan jenis tanah yang paling banyak adalah tanah regosol yaitu sekitar 86% dari keseluruhan jenis tanah yang ada di Kecamatan Leksono. Letak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan Leksono berjarak 10 km dari Ibu Kota Kabupaten Wonosobo. Kecamatan Leksono terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 13 Desa.

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045 Pembagian WP Aglomerasi di Kabupaten Wonosobo meliputi WP Jaga tengah (kawasan utara), Kerso (kawasan tengah), Jaran kepil (kawasan timur), Tujoseno (kawasan barat) dan Bakalintang (kawasan selatan). Sesuai dengan hal tersebut Kecamatan Leksono masuk kedalam Wilayah Pengembangan Tujoseno (kawasan barat) yang berfokus pada pengembangan pertanian tanaman pangan, agro industri, serta perdagangan dan jasa.

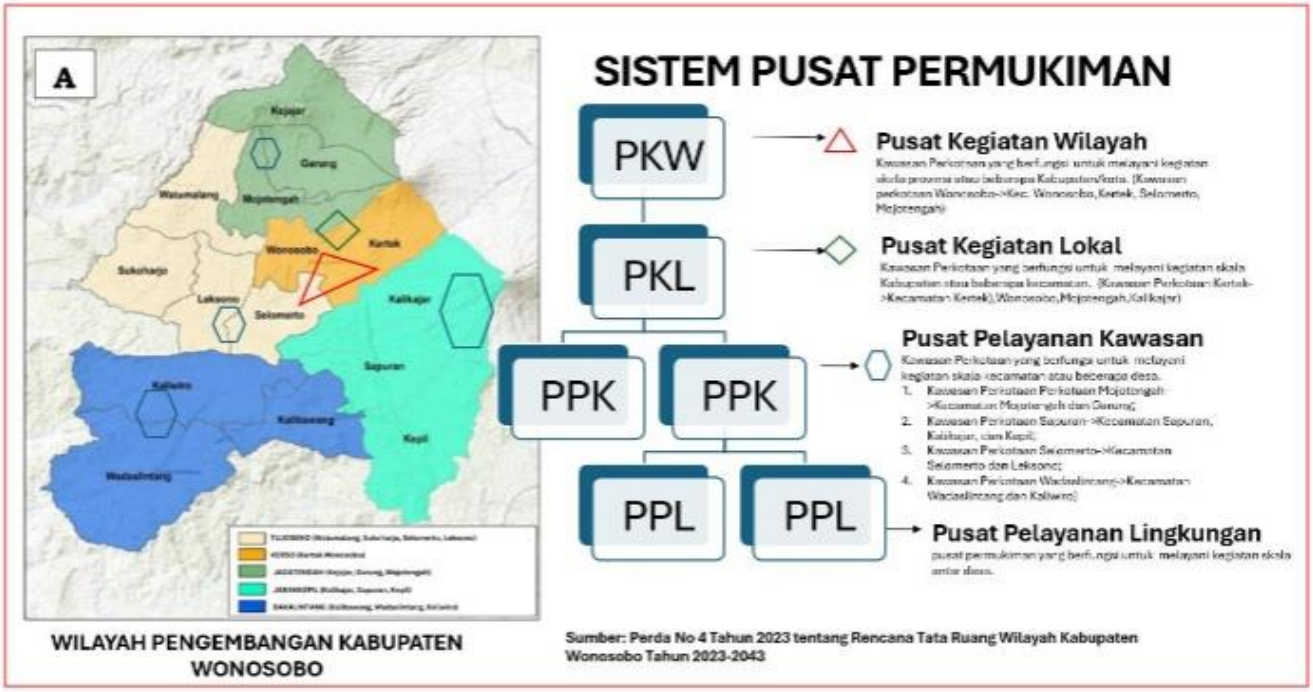
Gambar 2.1
Pengembangan Wilayah Berdasarkan RPJPD tahun 2025-2045



Sumber : Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2024

Adapun untuk intervensi pada wilayah pengembangan menyelaraskan denganarahan RPJMN yang ada di lokus WP Jawa yang meliputi kawasan pertumbuhan; kawasan komoditas unggulan; kawasan swasembada pangan; air, dan energi; kawasan afirmasi dan kawasan konservasi dan bencana alam.Pada kawasan pertumbuhan memperhatikan arahan pada struktur ruangpada RTRW. Struktur Ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. Sistem pusat permukiman mencakup keterkaitan dengan perencanaan lokasi permukiman, infrastruktur, fasilitas umum serta konektivitas antara pusat permukiman untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata. Sistem pusat permukiman dibagi menjadi 4(empat) yaitu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL),Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan.

Gambar 2.2
Sistem Pusat Permukiman pada Struktur Ruang RT RW



Sumber : DPUPR Kabupaten Wonosobo, 2023

Sesuai Dengan Perda Wonosobo No 4 Tahun 2023 bahwa Kecamatan Leksono termasuk kedalam wilayah

1) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu Kawasan Perkotaan Selomerto berdampingan dengan Kecamatan Selomerto
2) Sistem Jaringan Transportasi
   a. Jalan Arteri Primer yaitu Bts. Kab. Banjarnegara – Selokromo,Selokromo – Bts. Kota Wonosobo;
   b. Jalan Kolektor Primer yaitu Wadaslintang – Selokromo.
   c. Terminal Penumpang Tipe C yaitu terminal Leksono dan Sawangan
3) Sistem Jaringan Energi yaitu Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Sebagai Kawasan Perkotaan Kecamatan Leksono berfungsi melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa. Keunggulan yang dapat terus dikembangkan dari Kecamatan Leksono ialah:

1. Pertanian
   Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Leksono bermata pencaharian sebagai petani baik sebagai petani sendiri, penggarap, maupun sebagai buruh tani. Kecamatan Leksono merupakan Penghasil tanaman pangan padi dan jagung serta komoditas holtikultura cabai keriting dan cabai rawit serta buah salak, durian, pisang dan Nangka dan penghasil dari tanaman biofarmaka jahe dan kapulaga. Pertanian padi masih menjadi unggulan terutama di Desa Sojokerto, Wonokerto dan sekitarnya. Sedangkan untuk komoditas unggulan tanaman pertanian yang lain adalah tanaman hortikultura salak mayoritas terdapat di desa Kalimendong, Jonggolsari dan Manggis dimana jumlah produksinya terus meningkat setiap

tahunnya terbukti pada tahun 2024 Kecamatan Leksono menjadi penghasil salak terbesar di Wonosobo mencapai 21.891,25 Ton.

2. Peternakan
   Meskipun potensi ternak di Kecamatan Leksono tidak besar karena adanya alih fungsi lahan sehingga menyebabkan lahan untuk pakan ternak terbatas, namun jumlah populasi ternak di Kecamatan Leksono masih cukup banyak seperti Potensi produksi peternakan kambing, ayam ras potong dan ayam buras.
3. UMKM
   Kecamatan Leksono memiliki 180 industri kecil menengah dan 1.631 usaha mikro kecil serta terdapat 23 koperasi dan 10 koperasi yang aktif.

4. Pariwisata
   Kecamatan Leksono memiliki 4 Desa wisata yaitu Desa wisata Lipursari, Selokromo, Sawangan dan Kalimendong dengan destinasi wisata meliputi River Tubing, Curug Sibarat, Bukit Mbeser, Bukit Sibarat dan wisata budaya Selokromo.

Selain potensi - potensi yang ada di wilayah Kecamatan Leksono, dibawah ini akan disajikan juga kondisi terkait kemiskinan, stunting dan ATS selama 3 tahun terakhir. Kemiskinan, stunting, dan anak tidak sekolah adalah tiga masalah yang saling terkait, terutama dalam tiga tahun terakhir permasalahan ini diperlukan *root cause analysis* sehingga upaya yang dilakukan sesuai dengan akar permasalahan, tindakan penanganan tiga masalah tersebut dapat dilakukan secara reversibel. Pemerintah daerah oleh Bappeda telah melakukan pemetaan masalah secara komprehensif di tingkat kecamatan dan desa, serta menyusun strategi penanggulangan yang terintegrasi.

1. Kondisi Kemiskinan

Data kemiskinan di Kecamatan Leksono dari tahun 2022 s/d 2024 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Data KK Kategori Miskin di Kecamatan Leksono

No	Desa	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Durensawit	36	0	0
2	Besani	11	0	0
3	Jlamprang	13	1	1
4	Jonggolsari	25	2	2
5	Kalimendong	48	0	0
6	Leksono	54	2	1
7	Lipursari	46	17	10
8	Manggis	49	1	0
9	Pacarmulyo	135	6	3

No	Desa	Tahun		
		2022	2023	2024
10	Sawangan	43	2	2
11	Selokromo	22	1	1
12	Sojokerto	41	0	0
13	Timbang	29	0	0
14	Wonokerto	2	0	0
Jumlah		**554**	**32**	**20**

Sumber : Data P3KE

Skema percepatan penghapusan kemiskinan di wilayah Kecamatan Leksono melalui intervensi APBD dan APBDes salah satunya dengan penekanan pada pemenuhan akses air bersih dan jamban sehat. Pada tahun 2023 Desa Manggis 100% ODF dan di Desa lainnya juga mengalami penurunan di tahun 2024.

2. Stunting

Kondisi stunting dari tahun 2022 dan tahun 2023 di Kecamatan Leksono secara menyeluruh terjadi penurunan 10%, hal ini disebabkan adanya penambahan indikator baru dalam pendataan dan masih dibutuhkan pemberian pemahaman tentang pola asuh anak secara menyeluruh kepada Masyarakat dalam hal pemberian makan, kebersihan, kesehatan dan psikososial.

Tabel 2.2
Data Anak Stunting (Orang) di Kecamatan Leksono 3 tahun terakhir

No	Desa	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Durensawit	21	20	2
2	Besani	5	3	3
3	Jlamprang	20	16	12
4	Jonggolsari	40	41	13
5	Kalimendong	22	21	1
6	Leksono	35	41	5
7	Lipursari	11	18	27
8	Manggis	30	28	2
9	Pacarmulyo	14	16	5
10	Sawangan	21	27	31
11	Selokromo	5	7	23
12	Sojokerto	30	28	6
13	Timbang	14	12	0
14	Wonokerto	7	7	9
Jumlah		275	273	139

Sumber : Data Pusdatin

3. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) terjadi hampir menyeluruh di seluruh Kabupaten Wonosobo, tidak terkecuali di Kecamatan Leksono. Penyebab terjadinya Anak Tidak Sekolah (ATS) sangat beragam, antara lain karena faktor ekonomi, sosial, lingkungan, keluarga dan Pendidikan. Data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kecamatan Leksono dalam kurun waktu 3 tahun tertuang dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Data Anak Tidak Sekolah (Orang) Kecamatan Leksono

No	Desa	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Durensawit	8	0	0
2	Besani	6	2	1
3	Jlamprang	19	2	1
4	Jonggolsari	4	3	4
5	Kalimendong	7	2	3
6	Leksono	8	2	6
7	Lipursari	21	5	0
8	Manggis	12	5	0
9	Pacarmulyo	16	3	3
10	Sawangan	13	2	1
11	Selokromo	1	0	0
12	Sojokerto	6	2	0
13	Timbang	0	0	3
14	Wonokerto	6	1	3
Jumlah		**127**	**29**	**25**

Kecamatan Leksono telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan, stunting dan anak tidak sekolah (ATS). Pemerintah kecamatan berkolaborasi dengan Korwil Leksono, Puskesmas Leksono dan Dinas terkait telah meluncurkan program-program seperti bantuan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin, pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan kerja, dan program kesehatan yang membantu pengetahuan masayarakat tentang makanan bergizi dan perawatan kesehatan yang baik dan benar.

Selain itu, Kecamatan Leksono juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan. Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, kecamatan Leksono dapat menciptakan perubahan yang signifikan, di mana setiap anak dapat tumbuh sehat, bersekolah, dan mencapai potensi mereka sepenuhnya.

Upaya – upaya tersebut terbukti mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan penduduk di kecamatan Leksono, hal ini dibuktikan dengan kondisi kemiskinan, angka anak tidak sekolah (ATS) dan stunting yang menurun setiap tahunnya.

2.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan

Tugas dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1) Kecamatan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagian urusan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah serta memelihara prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan.
2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
   b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasianwilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
   c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
   d. Penyelenggaraan pemerintahan umum;
   e. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan; dan
   f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya;

Penjabaran tugas pokok dan fungsi kecamatan tersebut diatas dijabarkan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai-berikut :

1) Camat;

Camat memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Camat mendapatkan sebagian pelimpahan kewenangan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Wonosobo

Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah dari Bupati Kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yang meliputi :

a. Pelayanan perizinan;
b. Pelayanan non perizinan.

2) Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kecamatan meliputi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset, ketatalaksanaan dan keorganisasian, tata usaha, umum dan kerumahtanggaan, kehumasan, pembinaan hukuman pelayanan kepada masyarakat.

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi, inventarisasi permasalahan dan bahan pemecahan permasalahan di bidang pelayanan, perizinan, PATEN, serta pengelolaan Data dan Informasi, Data Monografi Kecamatan, Data Kependudukan, dan-lain-lain secara terintegrasi dengan PATEN

3) Seksi Pemerintahan;

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas antara lain melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pemerintahan meliputi pemerintahan desa/kelurahan, perangkat dan lembaga desa/kelurahan, pembinaan kerja sama antar desa/kelurahan, batas wilayah desa/kelurahan, pelantikan dan pengambilan sumpah kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, pengevaluasian peraturan desa tentang Pungutan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa, Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi Daerah, keagrariaan dan administrasi pertanahan.

4) Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial;

Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial mempunyai tugas antara lain melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kesejahteraan rakyat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, bahan pemecahan permasalahan bidang kesejahteraan masyarakat dan sosial, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, ketenagakerjaan, perpustakaan, pariwisata baik di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan serta pengkoordinasiaan dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan.

5) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat meliputi perekonomian, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa/kelurahan terpadu, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat bidang fisik prasarana, penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kecamatan serta perencanaan pembangunan Daerah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan Daerah.

6) Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, inventarisasi data ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pembinaan, pengawasan dan tindakan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya, patroli wilayah, pengawasan dan pencegahan timbulnya gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pembinaan masyarakat dan generasi muda untuk pencegahan timbulnya penyakit masyarakat, serta pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat desa/kelurahan.

7) Kelurahan

Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu dan melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

8) Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas pokok menunjang tugas pokok Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahliannya masing-masing.
b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut di atas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan Lurah.
c. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
e. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Struktur Organisasi Kecamatan

Adapun bagan Struktur Organisasi Kecamatan menurut perbup rintuk Kecamatan Nomor 56 Tahun 2016 sebagai berikut:

Gambar 2.3
Struktur Organisasi Kecamatan Leksono



Sumber : perbub rintuk Kecamatan Nomor 56 Tahun 2016

2.3 Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Leksono didukung oleh semua aparatur yang terdiri dari pejabat Struktural, Staf dan pegawai non ASN sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jumlah pegawai Kecamatan dan Kelurahan Leksono sebanyak 28 orang dengan rincian status kepegawaian sebagai-berikut :

a) Pegawai Negeri Sipil PNS : 15 orang, terdiri dari:
   - Golongan IV : 2 orang
   - Golongan III : 8 orang
   - Golongan II : 4 orang
   - Golongan I : 1 orang

b) Calon Pegawai Negeri Sipil: 1 orang

c) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja : 4 orang

d) Tenaga Honorer : 8 orang

Tabel 2.4

Daftar Nominatif PNS/CPNS Kecamatan Leksono Per September Tahun 2025
Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	JML GOL.	JUMLAH PER-GOLONGAN																
		GOL I				GOL II				GOL III				GOL IV				
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Laki-laki	8	0	0	0	1	1	0	0	3	0	1	0	1	1	1	0	0	0
Perempuan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Jumlah	13	0	0	0	1	1	0	0	3	2	1	2	1	1	1	0	0	0

Tabel 2.5
Daftar Nominatif PNS/CPNS Kelurahan Leksono Per September Tahun 2025
Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	JML GOL.	JUMLAH PER-GOLONGAN																
		GOL I				GOL II				GOL III				GOL IV				
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Laki-laki	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Perempuan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Jumlah	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0

Tabel 2.6
Daftar Nominatif PPPK Kecamatan Leksono Per September Tahun 2025
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	JML GOL.	JML GOL. KOSONG	JUMLAH PER-GOLONGAN																
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII
Laki-laki	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perempuan	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2.7
Daftar Nominatif PPPK Kelurahan Leksono Per September Tahun 2025
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	JML GOL.	JML GOL. KOSONG	JUMLAH PER-GOLONGAN																
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII
Laki-laki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perempuan	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2.8

Daftar Pegawai Non ASN Kecamatan dan Kelurahan Leksono
Per September Tahun 2025

JENIS KELAMIN	JML	TENAGA ADMINISTRASI	TENAGA KEBERSIHAN	PENJAGA MALAM
Laki-laki	2	2	0	0
Perempuan	3	3	0	0
Jumlah	5	5	0	0

2.4 Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan

Fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan Leksono terdiri dari Sarana bergerak dan tidak bergerak berupa kendaraan dan gedung kantor beserta isinya yang terletak di Kelurahan dan Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo, menurut Buku Inventaris meliputi :

Tabel 2.9
Daftar Aset Kecamatan Leksono Tahun 2024

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Fisik
1	Tanah Bangunan Kantor	1	Baik
2	Transportable Generating Set	1	Baik
3	Pompa Air	1	Baik
4	Mobil	2	Baik
5	Sepeda Motor	10	Baik
6	Mesin Gergaji	2	Baik
7	Lemari Kayu	11	Baik
8	Rak Besi	11	Baik
9	Rak Kayu	2	Baik
10	Filling Kabinet Besi	2	Baik
11	CCTV	4	Baik
12	Papan Pengumuman	2	Baik
13	Meja Kerja Kayu	3	Baik
14	Kursi Kayu	10	Baik
15	Meja Rapat	10	Baik
16	Tempat Tidur Kayu	3	Baik
17	Meja Podium	1	Baik
18	Meja Tambahan	1	Baik
19	Meja 1/2 Biro	9	Baik
20	Meja Makan Kayu	1	Baik
21	Kursi Rapat	30	Baik
22	Kursi Tamu	4	Baik
23	Kursi Putar	4	Baik
24	Bangku Tunggu	7	Baik
25	Kursi Lipat	59	Baik

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Fisik
26	Meja Komputer	6	Baik
27	Meubeleur Lainnya	1	Baik
28	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik
29	Lemari Es	2	Baik
30	A.C. Window	1	Baik
31	Kipas Angin	13	Baik
32	Kompor Gas	1	Baik
33	Televisi	2	Baik
34	Amplifier	2	Baik
35	Loudspeaker	3	Baik
36	Sound System	2	Baik
37	Megaphone	1	Baik
38	Microphone	4	Baik
39	Microphone Floor Stand	4	Baik
40	Camera Video	1	Baik
41	Tustel	2	Baik
42	Handy Cam	1	Baik
43	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Baik
44	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	Baik
45	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik
46	Meja Tamu Biasa	3	Baik
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik
48	Kusi Kerja Pejabat Eselon IV	5	Baik
49	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10	Baik
50	Audio Amplifier	2	Baik
51	Layar Film	2	Baik
52	Telephone (PABX)	1	Baik
53	Pesawat Telephone	8	Baik
54	Unit Tranceiver Ssb Stationer	1	Baik
55	Antene SHF Stationery	1	Baik
56	P.C Unit	5	Baik
57	Laptop	8	Baik
58	Scanner	1	Baik
59	Printer	10	Baik
60	Peralatan Jaringan Lainnya	1	Baik
61	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7	Baik
62	Tugu Pembangunan	1	Baik

Sumber: data BMD Kecamatan Leksono Tahun 2024

Tabel 2.10
Daftar Aset Kelurahan Leksono Tahun 2024

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Fisik
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	1	Baik
2	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	3	Baik
3	Tanah Usaha	19	Baik
4	Tanah Lapangan Sepak Bola	2	Baik
5	Tanah untuk Jalan Desa	12	Baik
6	Tanah untuk Makam Umum	1	Baik
7	Transportable Generating Set	1	Baik
8	Sepeda Motor	3	Baik
9	Lemari Besi/Metal	3	Baik
10	Filling Kabinet	3	Baik
11	Lemari Kaca	2	Baik
12	CCTV	1	Baik
13	Layar LCD Projector	1	Baik
14	Meja Kerja Kayu	10	Baik
15	Kursi Kayu	2	Baik
16	Meja Resepsionis	1	Baik
17	Meja Periksa Pasien	1	Baik
18	kasur/spring Bed	3	Baik
19	Kursi Tamu	1	Baik
20	Bangku Tunggu	3	Baik
21	Kursi Lipat	60	Baik
22	Kipas Angin	1	Baik
23	Kompor Gas	1	Baik
24	Alat Dapur Lainnya	1	Baik
25	Loudspeaker	2	Baik
26	Soundsystem	2	Baik
27	Camera Video	1	Baik
28	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Baik
29	Meja Tamu Biasa	1	Baik
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
31	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	1	Baik
32	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	7	Baik
33	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	3	Baik
34	Audio Amplifier	1	Baik
35	Layar Film/ Projector	1	Baik
36	Handy Talky	1	Baik
37	Alat Peraga Kejuruan Lainnya	4	Baik
38	P.CUnit	1	Baik
39	Laptop	6	Baik
40	Monitor	1	Baik
41	Printer	5	Baik
42	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	Baik

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Fisik
43	Bangunan Tempat Pertemuan lain-lain	1	Baik
44	Bangunan Gedung Tempat OR lain-lain	1	Baik

Sumber: data BMD Kecamatan Leksono Tahun 2024

2.5 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kantor Kecamatan Leksono berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 09 Tahun 2007, Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kantor Kecamatan Leksono disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo tersusun dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Leksono
Kabupaten Wonosobo berdasarkan IKU

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKU	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	82	82	82,5	83,5	85	85,76	88,85	86,37	91,75	93,05	104,58	108,35	104,69	109,88	109,47	
2	Nilai Evaluasi SAKIP	63	63,34	64,5	65,76	66,42	68,64	N/A	N/A	68,2	70,6	72,76	N/A	N/A	103,71	106,29	106	

Sumber : LKjIP Kecamatan Leksono tahun 2020 – 2024

Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Leksono dari tahun 2020 s.d 2024 melebihi dari nilai yang ditargetkan setiap tahunnya. Nilai tertinggi pada tahun 2024, dari yang ditargetkan sebesar 85% tercapai sebesar 93,05 atau realisasi target sebesar 109,47%. Demikian juga capaian nilai SAKIP dari tahun 2021 s.d 2024 melebihi dari nilai yang ditargetkan setiap tahunnya. Tahun 2024 tercapai sebesar 72,76 dari nilai yang ditargetkan sebesar 68,64 atau realisasi target sebesar 106%. Hal-hal yang mendukung pencapaian IKM Kecamatan Leksono Tahun 2024 sebesar 93,05%, adanya kebijakan

penerapan SKM pada semua Seksi di Kecamatan, tidak hanya di unit Pelayanan Paten saja. Dengan perolehan nilai capaian diatas, baik nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) maupun nilai SAKIP, Kecamatan Leksono mendapatkan kriteria “BAIK”.

Tabel 2.12
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Anggaran dan Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	N/A	N/A	30.000.000	90.000.000	105.000.000	N/A	N/A	30.000.000	90.000.000	99.114.490	N/A	N/A	100	100	94,39
Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	N/A	N/A	150.000.000	190.000.000	140.000.000	N/A	N/A	150.000.000	190.000.000	91.896.384	N/A	N/A	100	100	65,64
Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	N/A	N/A	10.000.000	20.000.000	79.250.000	N/A	N/A	10.000.000	20.000.000	58.779.960	N/A	N/A	100	100	74,17
Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	N/A	N/A	136.431.100	110.500.000	118.750.000	N/A	N/A	136.431.100	110.500.000	112.419.000	N/A	N/A	100	100	94,66
Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	N/A	N/A	90.000.000	60.000.000	57.000.000	N/A	N/A	90.000.000	60.000.000	5.380.000	N/A	N/A	100	100	9,43
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	2.253.646.819	2.460.719.965	2.611.978.353	N/A	N/A	2.253.646.819	2.460.719.965	2.213.136.272	N/A	N/A	100	100	84,73

Tabel 2.13
Pencapaian Kinerja Kecamatan Leksono berdasarkan Indikator Program

No	Urusan/Program/Indikator Program	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Target 2026	Realisasi Akhir	Status
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian			
KECAMATAN															
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)		82	85,76	82	88,85	82,5	86,37	83,5	91,75	85	93,05	90	109,47%	Sangat Tinggi
2	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kelurahan		N/A	N/A	N/A	N/A	82,5	86,96	83,5	89,66	84,5	86,97	90	102,92%	Sangat Tinggi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														

1	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
1	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	%	90	90	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
1	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	%	80	85	87	87	83,33	100	100	100	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
1	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	%	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi

Keterangan:

Sangat Tinggi : >= 91 - <= 100
Tinggi : >= 76 - <= 90
Sedang RendahSangat : >= 66 - <= 75
Rendah : > 50 - <= 65
: <= 50

Berdasarkan Tabel 2.13 capaian kinerja tahun 2024 Kecamatan Leksono dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran strategis 1.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan 2 indikator :

1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)

IKM Kecamatan Leksono diperoleh dari penghitungan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 atas 9 unsur pelayanan. Perolehan IKM pada tahun 2024 sebesar 93,05. Dibandingkan dengan target yang telah direncanakan sebesar 85 maka capaian IKM adalah 109,47 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi IKM Tahun 2023 sebesar 91,75, capaian tahun 2024 ada kenaikan 1,3 poin atau sebesar 101,4%. Dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2026) capaian IKM Kecamatan Leksono sebesar 110,57%.

IKM Kecamatan Leksono tahun 2024 apabila dibandingkan dengan 15 kecamatan lain di Kabupaten Wonosobo berada pada peringkat 3 seperti tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.14
Data SKM Kecamatan se Kabupaten Wonosobo

NO	KECAMATAN	NILAI RATA-RATA IKM	PERINGKAT
1	KERTEK	94,44	1
2	SUKOHARJO	94,11	2
3	**LEKSONO**	**93,05**	**3**
4	WADASLINTANG	93,04	4
5	WONOSOBO	92,93	5
6	KALIWIRO	92,06	6
7	GARUNG	92,63	7
8	SAPURAN	91,96	8
9	KALIBAWANG	91,87	9
10	KEJAJAR	91,27	10
11	KALIKAJAR	90,86	11
12	KEPIL	90,76	12
13	WATUMALANG	89,94	13
14	MOJOTENGAH	89,86	14
15	SELOMERTO	88,24	15

Sumber data SKM dari Bag. Organisasi SETDA tahun 2024

Penunjang Keberhasilan: Meningkatnya SDM, penambahan sarana dan prasarana serta tersedianya jaringan wifi yang memadahi untuk mendukung kegiatan pelayanan, tersedianya Blanko KTP el yang tersedia serta komunikasi yang baik antara petugas dengan masyarakat pelanggan.

2. Nilai Evaluasi SAKIP

Hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 hasil capaian Kecamatan Leksono memperoleh nilai 72,76 dengan predikat BB. Target tahun 2024 yang terlalu tinggi sebesar 100, karenanya tidak dapat tercapai. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 70,76 ada kenaikan nilai sebesar 2,09 poin. Apabila disandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Wonosobo Kecamatan Leksono ada di urutan 4.

Penunjang kenaikan nilai SAKIP Kecamatan Leksono tahun 2024 sebesar 72,76 adanya efektifitas dan efisiensi anggaran berbanding dengan capaian kinerja sehingga dapat digambarkan ada kecenderungan positif meningkatnya kinerja.

Tabel 2.15
Data SAKIP Kecamatan se Kabupaten Wonosobo

NO	KECAMATAN	NILAI SAKIP
1	SAPURAN	73,1
2	SUKOHARJO	72,96
3	KALIWIRO	72,93
4	**LEKSONO**	**72,76**
5	KEJAJAR	72,72
6	KEPIL	72,3
7	WONOSOBO	72,14
8	GARUNG	71,91
9	WADASLINTANG	71,18
10	WATUMALANG	71,15
11	MOJOTENGAH	70,96
12	KERTEK	70,95
13	KALIKAJAR	70,84
14	KALIBAWANG	70,73
15	SELOMERTO	63,48

Sumber Laporan SAKIP Inspektorat Tahun 2024

Hal yang mendukung perolehan nilai SAKIP sebesar 72,76 antara lainefektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran berbanding dengan capaian kinerja. Pencapaian yang sudah baik terus diupayakan untuk melakukan perbaikan sehingga hasil evaluasi pada tahun mendatang lebih meningkat.

Sasaran strategis 2 yaitu Menguatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan indikator persentase Lembaga Masyarakat Aktif.

Fasilitasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui PKK dan Karang Taruna. Fasilitasi bagi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) dan admin data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) melalui penyediaan data yang dilakukan (up date data) mencapai 100%, fasilitasi dan monitoring penyaluran bantuan. Fasilitasi dalam konvergensi stunting juga sudah dilakukan 100%.

Penunjang keberhasilan didukung dengan adanya Kerjasama antara kecamatan dengan desa serta masyarakat dalam memberdayakan sumber dayayang didukung ketersediaan data yang baik.

Sasaran strategis 3 yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan.

Persentasepenyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum mencapai 100%. Setiap adalaporan yang masuk segera ditindaklanjuti dan diselesaikan secara bertahap. Penanganan pelanggaran peraturan daerah dilakukan dengan persuasif baik melalui kunjungan, dialog juga teguran serta konflik yang ada ada dapat ditindaklanjuti / ditangani oleh pihak terkait dikecamatan Bersama Forkopimca Leksono.

Sasaran strategis 4 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan indikator kinerja persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umun sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan mencapai 100%,

Sasaran strategis 5 Meningkatnya Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa, indikator pertama mencapai 100% yaitu : Pesentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas baik dan tepat waktu, ini disebabkan karena keberhasilan pembinaan administrasi kepada pemerintahan desa, sehingga desa mampu bekerja dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporannya yang selalu tepat waktu. Sementara pada indikator kinerja yang kedua yaitu : Persentase Kepatuhan dan tepat waktu pembayaran PBB, di tahun 2024 baru bisa mencapai 80%, hal ini dikarenakan karena salah satunya adanya dampak lesunya perekonomian, pendapatan masyarakat menurun yang berpengaruh pada ekonomi masyarakat, sehingga ketepatan pembayaran PBB sesuai jatuh tempo tidak mencapai 100%.

2.6 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Leksono, maka kelompok sasaran layanan Kecamatan Leksono antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa
   Pemerintah Desa yang dilayani di Kecamatan Leksono meliputi 1 Kelurahan dan 13 Desa yaitu :
   a. Kelurahan Leksono
   b. Desa Jlamprang
   c. Desa Wonokerto

d. Desa Sawangan
e. Desa Selokromo
f. Desa Besani
g. Desa Sojokerto
h. Desa Timbang
i. Desa Manggis
j. Desa Pacarmulyo
k. Desa Durensawit
l. Desa Jonggolsari
m. Desa Kalimendong
n. Desa Lipursari

2. Masyarakat;
   Berdasarkan data BPS Tahun 2023 Kecamatan memiliki jumlah penduduk sebesar 48.880 terdiri dari 24.630 laki-laki dan 24.250 perempuan
3. Organisasi Perangkat Daerah
   Pelayanan terhadap OPD dalam hal pelaporan dan pemberian informasikepada instansi/unit kerja terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsiKecamatan.

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Leksono juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor, Komando Rayon Militer, Lembaga Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.

2.7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Kecamatan Leksono diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan Misi Pembangunan Daerah dalam RPD Kabupaten Wonosobo 2025-2029, maka permasalahan yang dihadapi Kecamatan Leksono antara lain :

1. Masih rendahnya peran kecamatan dalam koordinasi di tingkat kewilayahan
   Koordinasi merupakan suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan dalam suatu proses pembangunan, maka perlunya camat sebagai koordinator dalam pembangunan ditingkatkecamatan, meningkatkan hubungan koordinasi dengan semua stakeholder yang ada dikecamatan baik vertikal maupun horizontal, demi tercapainya pembangunan sesuai dengankebutuhan masyarakat.
2. Belum optimalnya fungsi tata kelola dan pelayanan publik di tingkat kewilayahan

Pelayanan publik yang baik merupakan cerminan tata kelola pemerintahan yang efektif. Sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat kecamatan, camat memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, transparan, dan berkualitas. Hal tersebut dilakukan diantaranya dengan :

a. Digitalisasi Pelayanan melalui Aplikasi dan Website Kecamatan
   Diantaranya dengan menerapkan layanan online untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, perizinan usaha, dan layanan lainnya.
b. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
   Model pelayanan ini memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi dalam satu lokasi tanpa perlu berpindah dari satu kantor ke kantor lain.
   Sasaran peyelenggaraan Standar Pelayanan PATEN Perizinan dan Non Perizinan adalah :
   1) terwujudnya pelayanan yang cepat tepat waktu, mudah dan transparan;
   2) meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan.
c. Pelayanan Berbasis Mobile Office (Layanan Jemput Bola)
   Layanan jemput bola sangat efektif untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan akses ke kantor kecamatan.Menjadwalkan pelayanan keliling dengan mobil layanan kecamatan untuk mendatangi desa-desa terpencil.Bekerja sama dengan Kelurahan dan RT/RW untuk mendata warga yang membutuhkan layanan jemput bola.
d. Meningkatkan Transparansi dengan Sistem Informasi Publik
   Keterbukaan informasi menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Beberapa kecamatan telah mengadopsi sistem informasi berbasis digital untuk menampilkan informasi anggaran, layanan, dan pengaduan masyarakat.Menyediakan papan pengumuman digital di kantor kecamatan dan website resmi untuk memberikan update terkini mengenai layanan dan program kecamatan.Menerapkan layanan pengaduan online melalui media sosial dan website kecamatan.

3. Masih lemahnya mainstreaming / pengarusutamaan terkait dengan Agrobisnis dan Pariwisata di tingkat kewilayahan
4. Belum optimalnya koordinasi terkait dengan penanggulangan kemiskinan di tingkat kewilayahan
   a. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dan rencana aksi tahunan sebagai acuan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan belum tersedia.
   b. Koordinasi terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan di antara satuan kerja terkait belum optimal. Permasalahan itu dapat mengakibatkan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan berpotensi tidak tepat sasaran, tidak terarah, dan tidak

terpadu. Dampak lainnya, target dan tujuan penanggulangan kemiskinan Tingkat kabupaten berpotensi tidak tercapai.

Tabel 2.16
Permasalahan Pelayanan

No	Kondisi Saat Ini	Permasalahan Utama	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya peran kecamatan dalam koordinasi di tingkat kewilayahan	1) Kewenangan yang terbatas. 2) Keterbatasan sumber daya manusia. 3) Sistem koordinasi yang belum efektif:	Setelah diberlakukannya otonomi daerah, posisi camat berubah dari kepala wilayah yang memiliki otoritas kuat menjadi perangkat daerah di bawah bupati/wali kota. Hal ini membuat camat tidak lagi menjadi pimpinan instansi vertikal (seperti Polsek atau Koramil) di wilayahnya, melainkan hanya menjalin hubungan kerja biasa.
2.	Belum optimalnya fungsi tata kelola dan pelayanan publik di tingkat kewilayahan	1) Sumber daya manusia di bidang pelayanan yang belum memperoleh pendidikan dan pelatihan yang memadai. 2) Jaringan Internet untuk melakukan pelayanan dansosialisasi belum memadai	SDM Pelayanan seringkali masih terjebak pada pola pikir yang kaku, berbasis aturan, dan mementingkan prosedur administratif dibandingkan hasil yang berorientasi pada kepuasan masyarakat
3	Masih lemahnya mainstreaming / pengarusutamaan terkait dengan Agrobisnis dan Pariwisata di tingkat kewilayahan	1) Kurangnya sinergi dan koordinasi dengan dinas terkait. 2) Infrastruktur yang tidak memadai. 3) Promosi dan pemasaran yang kurang optimal.	kebijakan yang tidak terintegrasi, koordinasi yang akurang baik, kapasitas sumber daya manusia yang rendah, serta keterbatasan infrastruktur
4	Belum optimalnya	1) Data yang tidak	Belum optimalnya Tim

No	Kondisi Saat Ini	Permasalahan Utama	Akar Masalah
	koordinasi terkait dengan penanggulangan kemiskinan di tingkat kewilayahan	terpadu dan akurat. 2) Sistem monitoring dan evaluasi yang belum efektif.	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan

Selain hal tersebut di atas masih terdapat permasalahan-permasalahan yaitu :

1. Kurangnya kualitas dan jumlah SDM dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan
2. Lemahnya penegakan aturan internal antara lain sistem kepegawaian, jenjang karier, jenjang pendidikan, *reward and punishment* tidak berjalan, pendekatan internal yang sifatnya lebih mengedepankan struktural artinya salah dan benar bukan berdasar fakta atau argumen yang kuat tetapi siapa yang berkuasa.
3. Inkonsistensi antara perencanaan dengan ketersediaan angggaran
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap pelaksanaan Musrenbang
5. Kurangnya partisipasi dan inovasi kelompok PKK ditingkat desa dalam melaksanakan program kerja PKK
6. Belum optimalnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan atau hukum Kurangnya sarana dan prasarana kelengkapan diruang pelayanan umum
7. Tingginya akomodasi untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepemudaan seni budaya dan agama di desa yang mengundang kecamatan
8. Terbatasnya kemampuan sumberdaya aparatur desa dalam mengikuti perkembangan berkenaan dengan faktor usia
9. Masih kurangnya kesadaran aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku
10. Kemampuan SDM aparatur desa tidak merata
11. Adanya kegiatan yang diluar tupoksi

2.8 Isu Strategis Sesuai Lingkungan Dinamis (Isu Nasional, Regional, Kabupaten)

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Kecamatan Leksono dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang pelayanan umum (Publik) Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya koordinasi dengan perangkat daerah vertikal dalam mendorong realisasi perencanaan dan pemeliharaan sarpras pelayanan umum
2. Masih rendahnya tingkat keaktifan kelembagaan desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat

3. Masih kurangnya kemampuan aparatur desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa
4. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan dalam memberikan pelayanan dan penguasaan terhadap teknologi
5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan.

Tabel 2.17
Isu Strategis Kecamatan Leksono

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINASMID YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			NASIONAL	PROVINSI	DAERAH	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tata Kelola dan Pelayanan Publik	Belum optimalnya Tata Kelola di tingkat kecamatan	Akselerasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan AdaptifBelum Optimal	Isu Tata Kelola Pemerintahan : Pemerintahan Yang Lebih Efektif dan Akuntabel, Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata Kelola Pemerintahan Dinamis dan Adaptif	Tata Kelola Pemerintahan Dinamis dan Adaptif
	Belum optimalnya Pelayanan Publik di tingkat kecamatan					Optimalisasi fungsi tata kelola dan pelayanan publik di tingkat kewilayahan
	Belum optimalnya peran Kecamatan dalam mendukung prioritas daerah					Peningkatan peran kecamatan dalam koordinasi di tingkat kewilayahan
						Optimalisasi koordinasi terkait dengan penanggulangan kemiskinan di tingkat kewilayahan

(Sumber RPJMD Kab. Wonosobo Tahun 2025-2029)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Visi dan Misi RPJMD

Visi merupakan cita-cita ideal yang ingin diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai wujud komitmen politik yang dipadukan dengan perencanaan daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 serta memperhatikan kondisiisu dan lingkungan strategis nasional dan global sehingga pada taraf implementasi lebih adaptif terhadap perkembangan situasi daerah, nasionaldan global.

1) Visi

Dengan memperhatikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada periode RPJMD sebelumnya dan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan isu-isu strategis daerah,tantangan pembangunan yang dihadapi serta perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan sangat kompetitif maka visi pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut:

VISI
MEWUJUDKANKAN WONOSOBO ADIL,SEJAHTERA DAN MAKMUR

Tabel 3.1
Penjelasan Visi

Unsur	Penjelasan
Sejahtera	Kondisi dimana masyarakat Wonosobo terpenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi maupun sosial.
Adil	Kondisi Wonosobo yang merata dan seimbang. Pembangunan di Wonosobo melibatkan semua orang dari berbagai kelompoktanpa meninggalkan salah satunya dan hasil pembangunannya dapatdirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Makmur	Kondisi Wonosobo yang maju, aman dan lingkungan yang berkelanjutan(lestari). **Maju** : kemampuan daerah untuk bersaing di tingkat regional maupunnasional, dengan mengoptimalkan keunggulan komparatif, kompetitif,teknologi dan inovasi.

Unsur	Penjelasan
	Aman : kondisi adanya kepastian, jaminan dalam berusaha. **Berkelanjutan** : keseimbangan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang lestari, tangguh bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim

2) Misi

Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Visi "Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur" akan diwujudkan melalui 8 (delapan) misi sebagai berikut:

a. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian dengan tersedianya akses pendidikan dankesehatan;
b. Revitalisasi infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam untuk pengembangan agrobisnis dan pariwisata;
c. Eratkan persatuan untuk penguatan harmonisasi keberagaman;
d. Siapkan peluang produktif untuk generasi penerus bangsa yang berdaya saing;
e. Tumbuh dan kembangkan Koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomirakyat;
f. Amankan dan pelihara kelestarian lingkungan hidup dan warisan budayalokal;
g. Sediakan akses pasar regional dan nasional untuk produk unggulan Kabupaten Wonosobo;
h. Implementasikan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel, danterpercaya sebagai pengemban Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat).

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mensukseskan Misi Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Leksono memiliki andil dalam misi 8 yaitu **”Implementasikan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel, dan terpercaya sebagai pengemban Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat)”.**

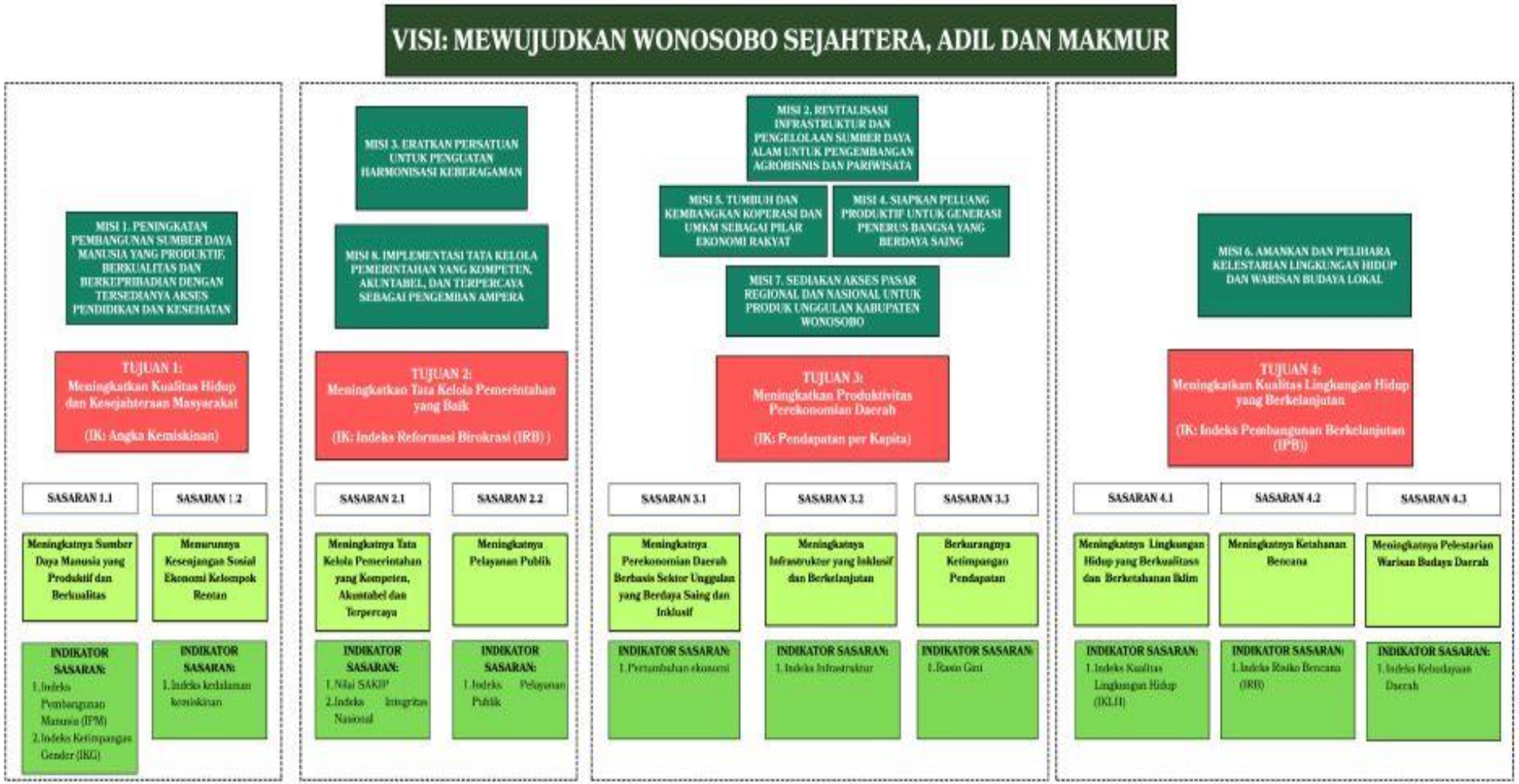
3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo di tahun 2025-2029,secara operasional dijabarkan dalam 4 (empat) tujuan dan 9 (sembilan) sasaran serta pengukuran indikator keberhasilan kinerja. Berikut penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator yang digunakan untuk pengukuran keberhasilan kinerja :

1. Tujuan 1 (pertama) meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang keberhasilannya diukur menggunakan Angka Kemiskinan dengan sasaran :
   - Meningkatkan sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas dengan indikator indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Ketimpangan Gender (IKG);
   - Menurunnya kesenjangan sosial ekonomi kelompok rentan dengan indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan.
2. Tujuan 2 (kedua) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang keberhasilannya diukur menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dengan sasaran :
   - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel dan terpercaya dengan indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai SAKIP) dan Indeks Integritas Nasional;
   - Meningkatnya pelayanan public dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP).
3. Tujuan 3 (ketiga) meningkatkan produktivitas perekonomian daerah yang keberhasilannya diukur menggunakan Pendapatan per Kapita dengan sasaran :
   - Meningkatnya perekonomian daerah berbasis sektor unggulan yang berdaya saing dan inklusif dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi (PE);
   - Meningkatnya infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan dengan indikator Indeks Infrastruktur;
   - Berkurangnya ketimpangan pendapatan dengan indikator Rasio Gini.
4. Tujuan 4 (keempat) meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan yang keberhasilannya diukur menggunakan Indeks Pembangunan Berkelanjutan (IPB) dengan sasaran :
   - Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan indicator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
   - Meningkatnya ketahanan iklim dan bencana dengan indicator Indeks Risiko Bencana (IRB).
   - Meningkatnya pelestarian warisan budaya daerah dengan indikator indeks Pembangunana Kebudayaan.

Dari tujuan dan sasaran tersebut maka cascading tujuan dan sasaran Visi danMisi Kabupaten Wonosobo tahun 2025-2029 digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1
Tujuan dan Sasaran Daerah



Sumber : RPJMD Kab. Wonosobo Tahun 2025-2029

3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Leksonomenetapkan satu tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

"***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kewilayahan***". Tujuan tersebut selaras dengan tujuan daerah ke 2 dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang keberhasilannya diukur menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)" melalui peningkatan pelayanan kepadamasyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan indikator tujuan dan sasaran :

1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan
2) Persentase Kelimpahan Daerah (Delegatif) di Kecamatan yang dilaksanakan Kecamatan

Kecamatan Leksono merupakan salah satu OPD yang mendukung sasaran ke 2 poin 1 RPJMD "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Berintegritas dan Inklusif" dengan Indikator sasaran "Nilai SAKIP, Indeks Integritas Nasional dan Indeks Pelayanan Publik (IPP)"

Program-program yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran ini antara lain:

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5) Program Pembinaan dan Pengawas Pemerintah Desa
6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan menjalankan program-program tersebut, kecamatan Leksono dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kewilayahan dan terlaksananya tugas dan fungsi camat sesuai kewenangan, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya Visi dan misikepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Leksono yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang

sangat pentingdalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

1) Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
2) Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
3) Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan.

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Leksono adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolak ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun.Teknik merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Leksono dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Leksono

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran Daerah dan PD/ Program Nomenklatur)	Satuan Indikator Kinerja	CAPAIAN	TARGET						KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1. Mengkoordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Pelayanan Umum 3. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 4. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah 6. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum 7. Membina dan	Tujuan Perangkat Daerah	Persentase Pelimpahan Kewenangan Daerah di Kecamatan yang dilaksanakan Kecamatan	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	N/A	90,00	92,84	93,64	94,45	95,26	96,06	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran Daerah dan PD/ Program Nomenklatur)	Satuan Indikator Kinerja	CAPAIAN	TARGET						KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa	Sasaran Perangkat Daerah	Persentase Pelimpahan Kewenangan Daerah di Kecamatan yang dilaksanakan Kecamatan	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	N/A	90,00	92,84	93,64	94,45	95,26	96,06	

3.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis danterencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah.

Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Wonosobo, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek,tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Wonosobo. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, sertapotensi unggulan yang dimiliki.

Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Wonosobo secara efektif dan berkelanjutan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan publik sebagai berikut :

1) Menguatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim demokrasi;
2) Meningkatkan sistem merit;
3) Meningkatkan pelayanan publikyang inklusif;
4) Meningkatkan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tersebut, strategi dan arah kebijakan untuk kecamatan Leksono adalah Meningkatkan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1) Peningkatan pemberdayaan masyarakat;
2) Peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan;
3) Peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan dan kelurahan;

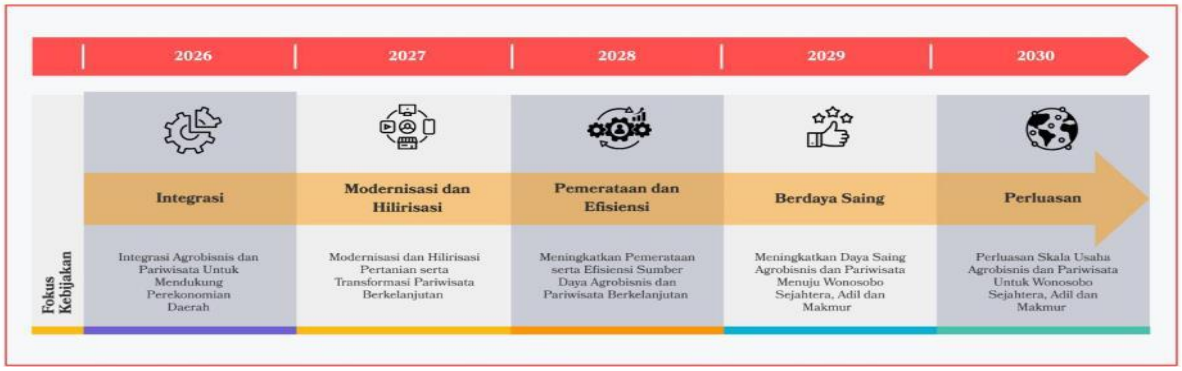
4) Peningkatan kualitas pelayanan publik;
5) Peningkatan koordinasi dan pembinaan kelurahan dan desa untuk memastikan keselarasan perencanaan dengan kebijakan daerah.

Tabel 3.3
Tahapan Strategi Renstra PD

TAHAP I 2026	***TAHAP II 2027***	***TAHAP III 2028***	***TAHAP IV 2029***	***TAHAP V 2030***
Penguatan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan	Penguatan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan	Penguatan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan	Penguatan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan	Penguatan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan

Dalam rangka menetapkan prioritas dan fokus melaksanakan strategi serta kebijakan setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun maka ditetapkan, penahapan pembangunan. Fokus kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut :

Gambar 3.4
Penahapan pembangunan daerah kabupaten wonosobo tahun 2026-2030



Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Leksono sebagai berikut :

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	NSPK : SASARAN RPJMD WONOSOBO Meningkatnya Pelayanan Publik PP 17 2018 tentang Kecamatan Pasal 10 terkait Tugas Kecamatan: 1. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 2. Mengkoordinasikan Pemeliharaan sarana dan Prasarana pelayanan Umum; 3. Mengkoordinasikan Kegiatan pemberdayaan Masyarakat; 4. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; 5. Mengkoordinasikan Penerapan dan Peraturan Daerah; 6. Menyelenggarakan Urusan pemerintahan Umum; 7. Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatkan peran Kecamatan dalam fungsi kewilayahan	1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 2. Peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan 3. Peningkatan kapasitas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik 5. Peningkatan koordinasi dan pembinaan Kelurahan dan Desa untuk memastikan keselarasan perencanaan dengan kebijakan daerah	

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur			
MISI 8 : Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya sebagai Pengemban Ampera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Berintegritas dan Terpercaya	Meningkatkan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan	1) Peningkatan pemberdayaan masyarakat; 2) Peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan; 3) Peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan dan kelurahan; 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik; 5) Peningkatan koordinasi dan pembinaan kelurahan dan desa untuk memastikan keselarasan perencanaan dengan kebijakan daerah.

3.5 Arah Kebijakan Tahunan

Arah kebijakan tahun 2026-2030 difokuskan pada kebijakan Penguatan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi:

1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik;

   Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

   Berikut adalah beberapa strategi dan upaya dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik:

   a. Transparansi dan Akuntabilitas

      Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP): Menunjukkan sejauh mana instansi mencapai target yang ditetapkan.

      Masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan kritik dan masukan, seperti melalui LAPORBUP, atau kanal media sosial resmi.

   b. Pelayanan Publik Berbasis Digital

      Inovasi pelayanan dengan mengembangkan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

   c. Penguatan SDM Aparatur

      Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN yang selama ini dituntut untuk memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial *kultural.* Penilaian Kinerja ASN Berbasis Merit *System* dimana promosi dan mutasi dilakukan berdasarkan kinerja, bukan kedekatan atau senioritas.

   d. Pencegahan Korupsi

      Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

   e. Pelibatan Masyarakat

      Meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan dan evaluasi misalnya melalui Musrenbang, polling, dan forum warga serta menjamin hak masyarakat untuk tahu dan mengawasi.

   f. Penyederhanaan Birokrasi

      Pemangkasan rantai birokrasi dengan mengurangi jumlah tahapan pelayanan untuk mempercepat proses dan Integrasi data antar instansi untuk mempercepat pengambilan keputusan.

2. Peningkatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang berjalan;

   langkah strategis untuk memastikan infrastruktur publik seperti jalan, saluran air, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan administratif sesuai dengan kewenangan tetap berfungsi optimal dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

3. Peningkatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang optimal;

Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah proses penyelarasan dan sinergi antar berbagai pihak (pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat itu sendiri) dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat.

Koordinasi yang optimal berarti terciptanya komunikasi yang efektif, peran yang jelas, integrasi program, dan komitmen bersama sehingga tujuan pemberdayaan bisa tercapai secara efisien dan berkelanjutan.

4. Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berjalan;

   Koordinasi penyelenggaraan tramtibum adalah upaya sistematis untuk menyatukan langkah antara unsur pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mencegah serta menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban secara terpadu.

   Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang optimal menuntut kerja sama aktif semua elemen – baik pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat. Dengan pendekatan kolaboratif dan responsif, segala bentuk potensi gangguan dapat dicegah dan ditangani secara cepat dan tepat, demi terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman.
5. Peningkatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang baik;

   Koordinasi penerapan dan penegakan Perda adalah proses menyelaraskan tugas dan fungsi antar instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat dalam melaksanakan dan menegakkan peraturan daerah agar berjalan efektif, adil, dan sesuai tujuan pembentukan perda tersebut ditingkat wilayah kecamatan.
6. Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang optimal;
7. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang optimal;

   Pembinaan dan pengawasan adalah dua fungsi penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola yang baik, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.

   a. Pembinaan adalah upaya pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dalam bentuk bimbingan, pelatihan, pendidikan, arahan, supervisi, dan fasilitasi terhadap pemerintahan desa.
   b. Pengawasan adalah proses pemantauan, evaluasi, pemeriksaan, dan pengendalian atas pelaksanaan pemerintahan desa agar sesuai aturan dan menghindari penyimpangan.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berikut program-program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama periode 2026-2030 :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan pada pengembangan inovasi pelayanan publik untuk kemudahan layanan dan digitalisasi tata kelola pemerintahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Persentase keselarasan Perencanaan Desa dan Kelurahan dengan prioritas Daerah, Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Stunting sesuai tata waktu yang ditentukan, Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Kemiskinan sesuai tata waktu yang ditentukan, Persentase Desa yang melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan kemiskinan tepat waktu.Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
   1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
   2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
   1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.

c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
   1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan pada peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Perempuan dan Masyarakat Rentan yang terlibat aktif dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah

Kelurahan (Muskel) dan Persentase program penanganan kemiskinan, pendidikan, stunting dan kelompok rentan yang terdanai di dalam Dana Desa dan Anggaran Kelurahan. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
    1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
    1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
    2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
    3) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada Penguatan keamanan dan ketertiban untuk menjaga wilayah yang kondusif. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase koordinasi kejadian kebencanaan, Persentase monitoring evaluasi antisipasi pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaporkan. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
    2) harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan tokoh masyarakat.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Keterwakilan unsur Agama dan Kepercayaan dalam kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
    1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
    2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu, Persentase desa yang menyelesaikan Pelaporan APBDes Tepat Waktu, Persentase Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Desa yang sudah terselenggara, Persentase Kesesuaian Realisasi Anggaran dan Pelaksanaan APBDes dan Persentase keselarasan Perencanaan Desa dengan prioritas Daerah. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan sebagai berikut :

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
   2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
   3) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
   4) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
   5) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
   6) Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
   7) Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk mendukung jalannya pemerintahan ditingkat Kabupaten/Kota yang mencakup berbagai aspek seperti: administrasi, keuangan, kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator indeks keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah, nilai SAKIP Kecamatan, persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik, Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, Persentase keterisian data statistik sektoral, Nilai hasil pengawasan kearsipan dan Persentase keselarasan program Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Program ini dilaksanakan melalui 5 kegiatan dan 22 sub kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya
4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Pemeliharaan Mebel
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra Kecamatan Leksono

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1. Mengkoordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Pelayanan Umum 3. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 4. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah 6. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum 7. Membina dan Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa	TPD.8.2.2.2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kewilayahan					
					Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	
					Persentase Pelimpahan Kewenangan Daerah di Kecamatan yang dilaksanakan Kecamatan	
	SPD.8.2.2.2.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kewilayahan					
					Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	
					Persentase Pelimpahan Kewenangan Daerah di Kecamatan yang dilaksanakan Kecamatan	
			OP.8.2.2.2.1.2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
					Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	
					Persentase Keselarasan usulan di Musyawarah Desa dan Kelurahan dengan Prioritas Daerah	
					Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Stunting sesuai tata waktu yang ditentukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN
						7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				-Musrenbang Kecamatan, Pra Musrenbang Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
						7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
				-Koordinasi Monev Sarpras Umum (Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur) --> Bankeu Prov / Kab -Koordinasi Pengelolaan Sampah di tingkat Desa/Kelurahan berbasis Reduce-Reuse-Recycle (3R)	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
						7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
				- Layanan Administrasi Kependudukan (jemput bola) - Rakor Admin - Layanan Inklusif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN
			OP.8.2.2.2.1.3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
					Persentase Perempuan dan Masyarakat Rentan yang terlibat aktif dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Kelurahan	
					Persentase Desa dan Kelurahan yang mengalokasikan dana untuk penanganan permasalahan daerah (kemiskinan, pendidikan, stunting, kelompok rentan)	
						7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				-Fasilitasi Wajib Belajar 13 tahun - Fasilitasi penanganan masalah sosial kemasyarakatan - Fasilitasi Lomba Pemberdayaan Masyarakat - Fasilitasi Porkab - Fasilitasi Penanganan Disabilitas - Kampung KB - fasilitasi Festival anak soleh indonesia - fasilitasi lomba mtq - fasilitasi Lomba masjid - Fasilitasi Penanganan - Kenakalan Remaja - Fasilitasi Penanganan Pernikahan Anak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN
				- Fasilitasi Desa Siaga - pembinaan ODF - Pembinaan UKS - Pembinaan Perpustakaan - fasilitasi forum kesehatan desa - Pembinaan karang taruna		
						7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
				- Fasilitasi PKK Kecamatan - Fasilitasi Penanganan Stunting (TPPS, Rakor linsek, monev)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
				- Fasilitasi Koperasi Merah Putih - Fasilitasi BUMDES - Fasilitasi Pameran UMKM	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang terfasilitasi	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
			OP.8.2.2.2.1.4. Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum			**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
					Persentase Koordinasi Kejadian Kebencanaan	
					Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaporkan	
						7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN
				1. Pembinaan Linmas (Pelatihan linmas, pengiriman kontingen lomba satlinmas) 2. Patroli Wilayah dan pengamanan hari besar 3. Rapat dan Pelaporan Penegakan Perda 4. Pembinaan dan Pemberdayaan SAR/Relawan 5. Penanggulangan Bencana Kecamatan 6. Fasilitasi FKDM	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
			OP.8.2.2.2.1.3. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
					Persentase Upaya Pencegahan Konflik SARA di Kecamatan	
						7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
				- Sosialisasi Bahaya NAPZA dan Penyakit Masyarakat - Sosialisasi Wawasan Kebangsaan - Fasilitasi Hari Jadi (gelar budaya) dan - HUT RI (termasuk Paskib) - Fasilitasi FKUB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN
						Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
				Fasilitasi Forum koordinasi pimpinan di kecamatan (rakor 4 kali setahun)	Jumlah forum koordinasi pimpinan di kecamatan yang terfasilitasi	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan
			OP.8.2.2.2.1.5. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			**7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
					Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	
					Persentase desa yang menyelesaikan Pelaporan APBDes Tepat Waktu	
					Persentase Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Desa yang sudah terselenggara	
					Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Kemiskinan Sesuai Tata Waktu yang ditentukan	
					Persentase Desa dan Kelurahan yang Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Kemiskinan Tepat Waktu	
						7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN
						Desa
				-Rakor Pemerintahan desa penyusunan Produk hukum desa -Pembinaan pemerintahan desa (Kades dan BPD) dan lembaga kemasyarakatan desa (LPMD, RT, RW, PKK, Karang taruna, Posyandu) -Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa -PBB	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				- Fasilitasi penyusunan APBDes - Pembinaan penatausahaan keuangan dan tatakelola aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Monev Pilkades, Rapat2, Sosialisasi dll	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
				-Monitoring musrenbangdes -Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
				Rakor Kemiskinan, Fasilitasi TKPK, Monitoring dan Evaluasi penanganan kemiskinan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN
				Kerjasama Antar Desa (BUMDesma, BKAD) Pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP	Jumlah Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga yang terfasilitasi	7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

KELURAHAN						
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
						7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				Musrenbang Kelurahan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Fasilitasi dan vervaldasi Anak Tidak Sekolah		
						7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
				Musrenbang Kelurahan	Jumlah Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
				Pembangunan Sarpras Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN
				Fasilitasi FKK	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
				Fasilitasi Kegiatan K3 di Kelurahan		
				Fasilitasi Kepemudaan		
				Fasilitasi PAUD		
				Fasilitasi Posyandu Lansia		
				Fasilitasi TK		
				Jasa Kader Pembangun Manusia		
				Jasa Kader Posyandu		
				Jasa RT dan RW		
				Jasa Tenaga Linmas		
				Jasa Tenaga Pembantu Kelurahan		
				Kegiatan Posyandu		
				Pembinaan RT dan RW		
				Perjalanan Dinas		
				PMT Posyandu Balita		
				Rapat Koordinasi RT dan RW		
						7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
				Fasilitasi Kegiatan PKK Fasilitasi Penurunan Stunting	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan yang dilaksanakan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Pelatihan Linmas FKDM Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Fasilitasi FKUB	Jumlah Laporan Hasil Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan tokoh masyarakat
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
				Fasilitasi Hari Jadi dan HUT RI Kelurahan	Meningkatnya Rasa Cinta Tanah Air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Tabel 4.1.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	OUTPUT SUB KEGIATAN (AKTIVITAS)	Pekerjaan Kelurahan	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	VARIABEL PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB (KASI/KASUBAG)	BASELINE 2024	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										**Rp113.686.000,00**	**Rp114.964.000,00**	**Rp115.365.000,00**	**Rp123.448.000,00**	**Rp119.040.000,00**
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)			Ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan, diukur melalui survei berdasarkan berbagai aspek pelayanan terutama Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Hasil Survei	Hasil Survei		93,05	93,3	93,55	93,90	94,30	94,70	95,25
	Persentase Keselarasan usulan di Musyawarah Desa dan Kelurahan dengan Prioritas Daerah			Keselarasan usulan musyawarah desa dan kelurahan dengan prioritas daerah di RKPD	Jumlah Usulan Desa dan Kelurahan yang sesuai dengan Prioritas dibanding dengan Priortas Daerah dikali 100%	Pembilang = Jumlah Usulan Desa dan Kelurahan yang sesuai dengan Prioritas Penyebut = Prioritas Daerah		N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Stunting sesuai tata waktu yang ditentukan			Pelaporan Intervensi Stunting di Aplikasi Pelaporan Stunting Kemendagri	sesuai Indikator di Aplikasi	sesuai Indikator di Aplikasi		N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
										Rp57.450.000,00	Rp62.400.000,00	Rp62.700.000,00	Rp66.600.000,00	Rp65.000.000,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	OUTPUT SUB KEGIATAN (AKTIVITAS)	Pekerjaan Kelurahan	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	VARIABEL PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB (KASI/KASUBAG)	BASELINE 2024	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-Musrenbang Kecamatan, Pra Musrenbang Kecamatan		Total Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	EKBANG			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
										Rp4.550.000,00				
7.01.02.2.01.0001 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasilitasi TKPK Kecamatan (rakor, pengelolaan dan pelaporan program Nangkis) --> khusus 2026								91,00	-	-	-	-
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum														
										Rp20.000.000,00	Rp20.500.000,00	Rp20.500.000,00	Rp22.500.000,00	Rp20.900.000,00
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-Koordinasi Monev Sarpras Umum (Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur) --> Bankeu Prov / Kab -Koordinasi Pengelolaan Sampah di tingkat Desa/Kelurahan berbasis Reduce-Reuse-Recycle (3R)		Total Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	EKBANG			91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	OUTPUT SUB KEGIATAN (AKTIVITAS)	Pekerjaan Kelurahan	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	VARIABEL PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB (KASI/KASUBAG)	BASELINE 2024	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
										Rp31.686.000,00	Rp32.064.000,00	Rp32.165.000,00	Rp34.348.000,00	Rp33.140.000,00
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Layanan Administrasi Kependudukan (jemput bola) - Rakor Admin - Layanan Inklusif		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PATEN			91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										**Rp181.000.000,00**	**Rp183.034.346,99**	**Rp183.673.456,00**	**Rp196.542.395,68**	**Rp189.524.645,50**
	Persentase Perempuan dan Masyarakat Rentan yang terlibat aktif dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Kelurahan			Tingkat partisipasi perempuan dan masyarakat rentan yang hadir dan terlibat aktif di musyawarah desa / musyawarah kelurahan. Kelompok Rentan : Lansia, Disabilitas, Kelompok Minoritas	Jumlah Perempuan dan Kelompok Rentan yang hadir dan terlibat di Musdes/Muskel dibanding Jumlah Peserta Musdes/Muskel dikali 100%	Pembilang = Jumlah Perempuan dan Kelompok Rentan yang hadir dan terlibat di Musdes/Muskel Penyebut = Seluruh Peserta Musdes/Muskel		N/A	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Persentase Desa dan Kelurahan yang mengalokasikan dana untuk penanganan permasalahan daerah (kemiskinan, pendidikan, stunting, kelompok rentan)			Jumlah Total Permasalahan Daerah yang anggarannya dialokasikan oleh desa dan kelurahan dibagi jumlah Total Permasalahan Daerah yang ada di Desa atau Kelurahan. Permasalahan Daerah yang dimaksud 1.Kemiskinan, 2.Pendidikan, 3.Stunting, 4.Kelompok Rentan.	Jumlah Total Permasalahan Daerah yang dialokasikan dana oleh desa dan kelurahan dibagi jumlah Total Permasalahan Daerah yang ada di Desa dan Kelurahan (Catatan : Jika ada salah satu atau keselurahan permasalahan ada di desa/kelurahan sudah tuntas, maka permasalahan tersebut dianggap sudah dialokasikan)	Pembilang = Jumlah Desa dan Kelurahan yang mengalokasikan dana untuk penanganan permasalahan daerah (kemiskinan, pendidikan, stunting, kelompok rentan) Penyebutnya = dibagi jumlah desa dan kelurahan		N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	OUTPUT SUB KEGIATAN (AKTIVITAS)	Pekerjaan Kelurahan	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	VARIABEL PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB (KASI/KASUBAG)	BASELINE 2024	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
										Rp45.000.000,00	Rp45.500.000,00	Rp45.900.000,00	Rp49.000.000,00	Rp47.000.000,00
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-Fasilitasi Wajib Belajar 13 tahun - Fasilitasi penanganan masalah sosial kemasyarakatan - Fasilitasi Lomba Pemberdayaan Masyarakat - Fasilitasi Porkab - Fasilitasi Penanganan Disabilitas - Kampung KB - fasilitasi Festival anak soleh indonesia - fasilitasi lomba mtq - fasilitasi Lomba masjid - Fasilitasi Penanganan - Kenakalan Remaja - Fasilitasi Penanganan Pernikahan Anak - Fasilitasi Desa Siaga - pembinaan ODF - Pembinaan UKS - Pembinaan Perpustakaan - fasilitasi forum kesehatan desa - Pembinaan karang taruna		Total Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KESOS			92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan														
										Rp41.000.000,00	Rp41.534.346,99	Rp39.773.456,00	Rp42.542.395,68	Rp41.524.645,50
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya	- Fasilitasi Penanganan Stunting (TPPS, Rakor linsek, monev)		Banyaknya Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya	KESOS			92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp21.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp23.000.000,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	OUTPUT SUB KEGIATAN (AKTIVITAS)	Pekerjaan Kelurahan	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	VARIABEL PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB (KASI/KASUBAG)	BASELINE 2024	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang terfasilitasi	- Fasilitasi Koperasi Merah Putih - Fasilitasi BUMDES - Fasilitasi Pameran UMKM		Banyaknya Usaha Ekonomi Masyarakat yang terfasilitasi	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang terfasilitasi	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang terfasilitasi	EKBANG			90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan										Rp75.000.000,00	Rp76.000.000,00	Rp77.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp78.000.000,00
7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	- Fasilitasi PKK Kecamatan					KESOS			92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										**Rp108.107.000,00**	**Rp108.714.499,74**	**Rp108.905.499,94**	**Rp112.748.499,80**	**Rp110.652.499,86**
	Persentase Koordinasi Kejadian Kebencanaan			Koordinasi kejadian kebencanaan yang dilaporkan maksimal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku	koordinasi kejadian kebencanaan dibanding jumlah semua kejadian bencana dikali 100%	Pembilang = koordinasi kejadian kebencanaan Penyebut = jumlah semua kejadian bencana		N/A	90,00	90,20	90,30	90,50	90,60	90,70
	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaporkan			Pelanggaran Peraturan Daerah Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dilaporkan	Pelanggaran Perda Trantibhum yang ditindaklanjuti oleh Kecamatan ke Satpol dibanding dengan Pelanggaran Perda Trantibhum yang terdata di kecamatan dikali 100%	Pembilang = Pelanggaran Perda **Trantibhum** yang ditindaklanjuti oleh Kecamatan ke Satpol Penyebut = Pelanggaran Perda **Trantibhum** yang terdata di kecamatan		N/A	90,00	90,20	90,30	90,50	90,60	90,70
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	OUTPUT SUB KEGIATAN (AKTIVITAS)	Pekerjaan Kelurahan	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	VARIABEL PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB (KASI/KASUBAG)	BASELINE 2024	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
										Rp84.307.000,00	Rp109.322.000,00	Rp109.704.000,00	Rp117.390.000,00	Rp113.198.000,00
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. Pembinaan Linmas (Pelatihan linmas, pengiriman kontingen lomba satlinmas) 2. Patroli Wilayah dan pengamanan hari besar 3. Rapat dan Pelaporan Penegakan Perda 4. Pembinaan dan Pemberdayaan SAR/Relawan 5. Penanggulangan Bencana Kecamatan 6. Fasilitasi FKDM		Total Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	TRANTIB		90,00	90,20	90,30	90,50	90,60	90,70
										Rp23.800.000,00				
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan tokoh masyarakat	Fasilitasi FKUB --> Khusus 2026					TRANTIB		90,00	90,2	-	-	-	-
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										**Rp82.587.549,48**	**Rp83.515.707,09**	**Rp83.807.799,57**	**Rp89.679.498,02**	**Rp86.477.141,06**
	Persentase Upaya Pencegahan Konflik SARA di Kecamatan			Perbandingan upaya pencegah konflik SARA yang dilakukan oleh Kecamatan dengan target pencegahan konflik SARA dalam satu tahun	Jumlah pelaksanaan pencegahan konflik SARA dibagi target pencegahan konflik SARA	Pembilang = Jumlah pelaksanaan pencegahan konflik dibagi target pencegahan konflik SARA		100,00	90,00	90,20	90,30	90,50	90,60	90,70
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah														
										Rp13.587.549,48	Rp73.515.707,09	Rp73.757.799,57	Rp78.979.498,02	Rp76.177.141,06

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	OUTPUT SUB KEGIATAN (AKTIVITAS)	Pekerjaan Kelurahan	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	VARIABEL PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB (KASI/KASUBAG)	BASELINE 2024	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	- Sosialisasi Bahaya NAPZA dan Penyakit Masyarakat - Sosialisasi Wawasan Kebangsaan - Fasilitasi Hari Jadi (gelar budaya) dan - HUT RI (termasuk Paskib) - Fasilitasi FKUB		Banyaknya Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	TRANTIB		90,00	90,20	90,30	90,50	90,60	90,70
										Rp60.000.000,00	-	-	-	-
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi Hari Jadi (gelar budaya) dan HUT RI (termasuk Paskib) --> Khusus 2026					TRANTIB		90,00	90,20	-	-	-	-
										Rp9.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp10.050.000,00	Rp10.700.000,00	Rp10.300.000,00
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah forum koordinasi pimpinan di kecamatan yang terfasilitasi	Fasilitasi Forum koordinasi pimpinan di kecamatan (rakor 4 kali setahun)		Banyaknya forum koordinasi pimpinan di kecamatan yang terfasilitasi	Jumlah forum koordinasi pimpinan di kecamatan yang terfasilitasi	Jumlah forum koordinasi pimpinan di kecamatan yang terfasilitasi	TRANTIB		100	100	100	100	100	100

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	OUTPUT SUB KEGIATAN (AKTIVITAS)	Pekerjaan Kelurahan	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	VARIABEL PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB (KASI/KASUBAG)	BASELINE 2024	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										**Rp 54.000.000,00**	**Rp 54.000.000,00**	**Rp 54.000.000,00**	**Rp 58.000.000,00**	**Rp 56.000.000,00**
	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu			Desa di wilayah kecamatan yang telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui Peraturan Desa (Perdes) pada waktu yang telah ditetapkan	Jumlah Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu dibanding jumlah seluruh desa dikali 100%	Pembilang = Jumlah Desa yang mengirimkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu Penyebut = Seluruh Desa		N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase desa yang menyelesaikan Pelaporan APBDes Tepat Waktu			Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APBDes tahunan sesuai batas waktu yang ditetapkan	Jumlah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes sesuai bayas waktu dibanding jumlah seluruh desa dikali 100%	Pembilang = Jumlah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes sesuai bayas waktu dibanding Penyebut = Seluruh Desa		N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Desa yang sudah terselenggara			Informasi berupa perencanaan dan anggaran desa secara digital maupaun non digital (APBDes, RPJMDes)	Jumlah Desa yang mempublikasikan dokumen APBDes dan RPMJDes secara digital dan non digital dibanding jumlah desa dikali 100%	Pembilang = Jumlah Desa yang mempublikasikan dokumen APBDes dan RPMJDes secara digital dan non digital Penyebut = seluruh desa		N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Kemiskinan Sesuai Tata Waktu yang ditentukan			Pelaporan Intervensi Penanggulangan Kemiskinan di Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Masyarakat	sesuai Indikator di Aplikasi	sesuai Indikator di Aplikasi		N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Desa dan Kelurahan yang Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Kemiskinan			Data Terpadu penanganan kemiskinan yang ditetapkan dan diwajibkan kepada desa/kelurahan	Jumlah Desa / Kelurahan yang melakukan verval dibanding dengan jumlah desa dikali 100%	Pembilang = Jumlah Desa / Kelurahan yang melakukan verval Penyebut = jumlah desa / kelurahan		N/A	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	OUTPUT SUB KEGIATAN (AKTIVITAS)	Pekerjaan Kelurahan	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	VARIABEL PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB (KASI/KASUBAG)	BASELINE 2024	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tepat Waktu													
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
										Rp 7.020.000,00	Rp 7.020.000,00	Rp 7.020.000,00	Rp 7.540.000,00	Rp 7.280.000,00
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-Rakor Pemerintahan desa penyusunan Produk hukum desa -Pembinaan pemerintahan desa (Kades dan BPD) dan lembaga kemasyarakatan desa (LPMD, RT, RW, PKK, Karang taruna, Posyandu) -Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa -PBB	-	Banyaknya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	PEMERINTAHAN		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
										Rp 10.044.000,00	Rp 10.044.000,00	Rp 10.044.000,00	Rp 10.788.000,00	Rp 10.416.000,00
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	- Fasilitasi penyusunan APBDes - Pembinaan penatausahaan keuangan dan tatakelola aset desa	-	Banyaknya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	PEMERINTAHAN		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
										Rp 20.196.000,00	Rp 20.196.000,00	Rp 20.196.000,00	Rp 21.692.000,00	Rp 20.944.000,00
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala	Monev Pilkades, Rapat2, Sosialisasi dll	-	Banyaknya dokumen kegiatan fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	PEMERINTAHAN		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	OUTPUT SUB KEGIATAN (AKTIVITAS)	Pekerjaan Kelurahan	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	VARIABEL PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB (KASI/KASUBAG)	BASELINE 2024	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Desa													
										Rp 4.320.000,00	Rp 4.320.000,00	Rp 4.320.000,00	Rp 4.640.000,00	Rp 4.480.000,00
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-Monitoring musrenbangdes -Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa	-	Banyaknya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	PEMERINTAHAN		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
										Rp 8.100.000,00	Rp 8.100.000,00	Rp 8.100.000,00	Rp 8.700.000,00	Rp 8.400.000,00
7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rakor Kemiskinan, Fasilitasi TKPK, Monitoring dan Evaluasi penanganan kemiskinan	-	Banyaknya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	KESOS		90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
										Rp 2.700.000,00	Rp 2.700.000,00	Rp 2.700.000,00	Rp 2.900.000,00	Rp 2.800.000,00
7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga yang terfasilitasi	Kerjasama Antar Desa (BUMDesma, BKAD) Pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP		Banyaknya dokumen kerjasama Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga yang terfasilitasi	Jumlah Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga yang terfasilitasi	Jumlah Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga yang terfasilitasi	PEMERINTAHAN		90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
										Rp 1.620.000,00	Rp 1.620.000,00	Rp 1.620.000,00	Rp 1.740.000,00	Rp 1.680.000,00
7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP)	-	Banyaknya Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			PEMERINTAHAN		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										**Rp3.225.344.745,00**	**Rp3.230.747.745,00**	**Rp3.232.444.745,00**	**Rp3.266.621.745,00**	**Rp3.247.983.745,00**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	OUTPUT SUB KEGIATAN (AKTIVITAS)	Pekerjaan Kelurahan	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	VARIABEL PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB (KASI/KASUBAG)	BASELINE 2024	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik			Proporsi aset tetap yang dimiliki oleh sebuah Perangkat Daerah (PD) yang berada dalam kondisi fungsional dan terawat sesuai standar				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			ukuran tingkat ketersediaan dan penyelesaian layanan dukungan administrasi yang esensial untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Nilai (skor) yang diperoleh dari hasil evaluasi atas keterbukaan informasi publik				87,67	88,20	88,50	88,70	89,00	89,20	89,50
	Persentase Keterisian Data Statistik Sektoral			mengukur kelengkapan data statistik yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan dalam Daftar Data Kabupaten				N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan			mengukur tingkat kepatuhan dan kinerja Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan kaidah, standar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku				N/A	55,58	65,53	68,07	69,87	71,73	73,60
	Persentase Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)			Konsistensi antara program yang direncanakan oleh Perangkat Daerah dalam Rencana Kerja (Renja) PD dengan program prioritas yang ditetapkan dalam RKPD				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu			perbandingan dokumen perencanaan dan evaluasi yang ditetapkan tepat waktu										
										Rp14.421	Rp14.583	Rp14.634	Rp15.659	Rp15.100.2

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	OUTPUT SUB KEGIATAN (AKTIVITAS)	Pekerjaan Kelurahan	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	VARIABEL PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB (KASI/KASUBAG)	BASELINE 2024	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
										.060,00	.150,00	.060,00	.370,00	30,00
X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			SEKRETARIAT		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
										Rp9.614.040,00	Rp9.722.100,00	Rp9.756.040,00	Rp10.439.580,00	Rp10.066.820,00
X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			SEKRETARIAT		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi serapan Anggaran Perangkat Daerah			Perbandingan antara jumlah total anggaran yang direalisasi dengan jumlah total pagu anggaran yang dialokasikan untuk Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran										
										Rp2.744.642.745,00	Rp2.744.642.745,00	Rp2.744.642.745,00	Rp2.744.642.745,00	Rp2.744.642.745,00
X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Tambahan Penghasilan ASN	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			SEKRETARIAT	N/A	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00	96,50
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
										Rp7.692.400,00	Rp7.777.000,00	Rp7.810.400,00	Rp8.352.000,00	Rp8.055.000,00
X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	penyediaan komponen listtrik	penyediaan komponen listtrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp28.842.000,00	Rp29.166.000,00	Rp29.270.000,00	Rp31.318.000,00	Rp30.200.200,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	OUTPUT SUB KEGIATAN (AKTIVITAS)	Pekerjaan Kelurahan	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	VARIABEL PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB (KASI/KASUBAG)	BASELINE 2024	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Alat Tulis Kantor, Kertas dan Tinta printer	Alat Tulis Kantor, Kertas dan Tinta printer	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp3.845.000,00	Rp3.889.000,00	Rp3.900.000,00	Rp4.175.800,00	Rp4.027.000,00
X.XX.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	isi ulang tabung gas (5 atau 12 Kg) perkakas rumah tangga	isi ulang tabung gas (5 atau 12 Kg) perkakas rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp5.768.000,00	Rp5.835.000,00	Rp5.850.000,00	Rp6.265.000,00	Rp6.040.000,00
X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	cetak amplop dinas cetak banner cetak stop map kop dinas foto copy	cetak amplop dinas cetak banner cetak stop map kop dinas foto copy	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp1.922.800,00	Rp1.945.000,00	Rp1.950.000,00	Rp2.088.000,00	Rp2.014.000,00
X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	langganan koran	langganan koran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp48.070.200,00	Rp48.609.000,00	Rp48.780.000,00	Rp52.197.000,00	Rp50.332.000,00
X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dinas makan minum Rapat	perjalanan dinas makan minum Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
										Rp38.456.000,00	Rp38.888.400,00	Rp39.024.000,00	Rp41.759.000,00	Rp40.267.000,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	OUTPUT SUB KEGIATAN (AKTIVITAS)	Pekerjaan Kelurahan	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	VARIABEL PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB (KASI/KASUBAG)	BASELINE 2024	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	pengadaan peralatan (kamera vidcom, microphone vidcom, Printer, Laptop, sarpras LAN, CCTV, Kamera, Drone, Handphone, LCD Projector)	pengadaan peralatan (kamera vidcom, microphone vidcom, Printer, Laptop, sarpras LAN, CCTV, Kamera, Drone, Handphone, LCD Projector)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp96.140.400,00	Rp97.221.000,00	Rp97.560.400,00	Rp104.395.800,00	Rp100.668.200,00
X.XX.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung kantor dan bangunan lainnya	Pengadaan Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp38.456.000,00	Rp38.888.400,00	Rp39.024.000,00	Rp41.758.000,00	Rp40.267.000,00
X.XX.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp19.228.400,00	Rp19.444.200,00	Rp19.512.400,00	Rp20.878.800,00	Rp20.134.200,00
X.XX.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
										Rp6.008.800,00	Rp6.075.250,00	Rp6.100.000,00	Rp6.523.950,00	Rp6.292.100,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	OUTPUT SUB KEGIATAN (AKTIVITAS)	Pekerjaan Kelurahan	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	VARIABEL PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB (KASI/KASUBAG)	BASELINE 2024	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Materai	Belanja Materai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp19.035.100,00	Rp19.305.250,00	Rp19.390.100,00	Rp21.098.950,00	Rp20.167.000,00
X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Belanja langganan Listrik, Air dan Internet (termasuk sewa aplikasi canva, drive dll)	Belanja langganan Listrik, Air dan Internet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp18.026.300,00	Rp18.230.000,00	Rp18.300.000,00	Rp19.575.000,00	Rp18.875.000,00
X.XX.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp72.105.300,00	Rp72.915.750,00	Rp73.160.400,00	Rp78.296.850,00	Rp75.501.150,00
X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	belanja jasa pelaksana transaksi keuangan, honor non ASN, belanja jasa tenaga administrasi, belanja jasa tenaga keamanan	belanja jasa pelaksana transaksi keuangan, honor nonASN, belanja jasa tenaga administrasi, belanja jasa tenaga keamanan, belanja jasa tenaga kebersihan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
										Rp19.228.080,00	Rp19.444.200,00	Rp19.512.080,00	Rp20.879.160,00	Rp20.133.640,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	OUTPUT SUB KEGIATAN (AKTIVITAS)	Pekerjaan Kelurahan	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	VARIABEL PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB (KASI/KASUBAG)	BASELINE 2024	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pajak dan Perizinannya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pajak dan Perizinannya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp2.403.510,00	Rp2.430.525,00	Rp2.439.010,00	Rp2.609.895,00	Rp2.516.705,00
X.XX.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp9.807.020,00	Rp9.861.050,00	Rp9.878.020,00	Rp10.219.790,00	Rp10.033.410,00
X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp7.210.530,00	Rp7.291.575,00	Rp7.317.030,00	Rp7.829.685,00	Rp7.550.115,00
X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp9.614.040,00	Rp9.722.100,00	Rp9.756.040,00	Rp10.439.580,00	Rp10.066.820,00
X.XX.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Sarpras Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan Sarpras Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp4.807.020,00	Rp4.861.050,00	Rp4.878.020,00	Rp5.219.790,00	Rp5.033.410,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	OUTPUT SUB KEGIATAN (AKTIVITAS)	Pekerjaan Kelurahan	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	VARIABEL PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB (KASI/KASUBAG)	BASELINE 2024	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
X.XX.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Sarpras Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan Sarpras Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
KELURAHAN														
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										**Rp608.259.554,00**	**Rp613.061.776,01**	**Rp614.570.149,00**	**Rp644.948.228,32**	**Rp628.382.835,50**
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa														
										Rp42.579.554,00	Rp41.023.776,01	Rp40.534.149,00	Rp30.692.228,32	Rp36.059.835,50
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Musrenbang Kelurahan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan	Musrenbang Kelurahan Fasilitasi Vervalisasi DTKS	Banyaknya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
		Fasilitasi dan vervaldasi Anak Tidak Sekolah	Fasilitasi dan vervaldasi Anak Tidak Sekolah											
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														
										Rp10.340.400,00	Rp10.456.620,00	Rp10.493.140,00	Rp11.228.340,00	Rp10.827.420,00
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musrenbang Kelurahan	Musrenbang Kelurahan	Total Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	OUTPUT SUB KEGIATAN (AKTIVITAS)	Pekerjaan Kelurahan	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	VARIABEL PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB (KASI/KASUBAG)	BASELINE 2024	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
										Rp124.084.800,00	Rp125.479.440,00	Rp125.917.680,00	Rp134.740.080,00	Rp129.929.040,00
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarpras Kelurahan	Pembangunan Sarpras Kelurahan	Total Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp382.594.800,00	Rp386.894.940,00	Rp388.246.180,00	Rp415.448.580,00	Rp400.614.540,00
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Fasilitasi FKK	Fasilitasi FKK	Banyaknya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
		Fasilitasi Kegiatan K3 di Kelurahan	Fasilitasi Kegiatan K3 di Kelurahan											
		Rapat Koordinasi RT dan RW	Rapat Koordinasi RT dan RW											
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan														
										Rp19.464.000,00	Rp19.682.800,00	Rp19.751.600,00	Rp21.135.600,00	Rp20.380.800,00
7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan di Kelurahan	Fasilitasi Kegiatan PKK	Fasilitasi Kegiatan PKK						90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp29.196.000,00	Rp29.524.200,00	Rp29.627.400,00	Rp31.703.400,00	Rp30.571.200,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan yang dlaksanakan	Fasilitasi Kegiatan PKK Fasilitasi Penurunan Stunting	Fasilitasi Kegiatan PKK	Banyaknya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan yang dlaksanakan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan yang dlaksanakan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan yang dlaksanakan			90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										**Rp52.276.700,00**	**Rp52.256.731,26**	**Rp52.250.453,07**	**Rp52.124.129,21**	**Rp52.193.027,14**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	OUTPUT SUB KEGIATAN (AKTIVITAS)	Pekerjaan Kelurahan	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	VARIABEL PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB (KASI/KASUBAG)	BASELINE 2024	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
										Rp39.207.500,00	Rp39.648.173,00	Rp39.786.714,00	Rp42.574.222,00	Rp41.053.895,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pelatihan Linmas FKDM Kelurahan	Pelatihan Linmas FKDM Kelurahan						90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp13.069.200,00	Rp12.608.558,26	Rp12.463.739,07	Rp9.549.907,21	Rp11.139.132,14
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Fasilitasi FKUB	Fasilitasi FKUB						90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			HUT RI							**Rp 33.620.450,52**	**Rp 33.998.292,91**	**Rp 34.117.200,43**	**Rp 36.507.501,98**	**Rp 35.203.858,94**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah														
										Rp33.620.450,52	Rp33.998.292,91	Rp34.117.200,43	Rp36.507.501,98	Rp35.203.858,94
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Meningkatnya Rasa Cinta Tanah Air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	Fasilitasi Hari Jadi dan HUT RI Kelurahan	Fasilitasi Hari Jadi dan HUT RI Kelurahan						90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	OUTPUT SUB KEGIATAN (AKTIVITAS)	Pekerjaan Kelurahan	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	VARIABEL PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB (KASI/KASUBAG)	BASELINE 2024	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										**Rp 69.904.294,42**	**Rp 70.690.005,53**	**Rp 70.936.785,43**	**Rp 75.906.848,11**	**Rp 73.196.486,51**
	Persentase Aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik			Proporsi aset tetap yang dimiliki oleh sebuah Perangkat Daerah (PD) yang berada dalam kondisi fungsional dan terawat sesuai standar				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			ukuran tingkat ketersediaan dan penyelesaian layanan dukungan administrasi yang esensial untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Nilai (skor) yang diperoleh dari hasil evaluasi atas keterbukaan informasi publik				87,67	88,20	88,50	88,70	89,00	89,20	89,50
	Persentase Keterisian Data Statistik Sektoral			mengukur kelengkapan data statistik yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan dalam Daftar Data Kabupaten				N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan			mengukur tingkat kepatuhan dan kinerja Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan kaidah, standar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku				N/A	55,58	65,53	68,07	69,87	71,73	73,60
	Persentase Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)			Konsistensi antara program yang direncanakan oleh Perangkat Daerah dalam Rencana Kerja (Renja) PD dengan program prioritas yang ditetapkan dalam RKPD				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	OUTPUT SUB KEGIATAN (AKTIVITAS)	Pekerjaan Kelurahan	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	VARIABEL PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB (KASI/KASUBAG)	BASELINE 2024	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
										Rp1.118.500,00	Rp1.131.000,00	Rp1.135.000,00	Rp1.214.500,00	Rp1.171.100,00
X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	penyediaan komponen listtrik	penyediaan komponen listtrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp2.796.250,00	Rp2.827.500,00	Rp2.837.500,00	Rp3.036.250,00	Rp2.927.750,00
X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Alat Tulis Kantor, Kertas dan Tinta printer	Alat Tulis Kantor, Kertas dan Tinta printer	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp3.131.800,00	Rp3.166.800,00	Rp3.178.000,00	Rp3.400.600,00	Rp3.279.080,00
X.XX.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	isi ulang tabung gas (5 atau 12 Kg) perkakas rumah tangga	isi ulang tabung gas (5 atau 12 Kg) perkakas rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp1.901.450,00	Rp1.922.700,00	Rp1.929.500,00	Rp2.064.650,00	Rp1.990.870,00
X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	cetak amplop dinas cetak banner cetak stop map kop dinas foto copy	cetak amplop dinas cetak banner cetak stop map kop dinas foto copy	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp671.100,00	Rp678.600,00	Rp681.000,00	Rp728.700,00	Rp702.660,00
X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	langganan koran	langganan koran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp1.565.900,00	Rp1.583.400,00	Rp1.589.000,00	Rp1.700.300,00	Rp1.639.540,00
X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	perjalanan dinas makan minum Rapat	perjalanan dinas makan minum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	OUTPUT SUB KEGIATAN (AKTIVITAS)	Pekerjaan Kelurahan	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	VARIABEL PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB (KASI/KASUBAG)	BASELINE 2024	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
	SKPD		Rapat											
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
										Rp2.238.000,00	Rp2.270.000,00	Rp2.280.000,00	Rp2.440.000,00	Rp2.360.000,00
X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	pengadaan peralatan (kamera vidcom, microphone vidcom, Printer, Laptop, sarpras LAN, CCTV, Kamera, Drone, Handphone, LCD Projector)	pengadaan peralatan (kamera vidcom, microphone vidcom, Printer, Laptop, sarpras LAN, CCTV, Kamera, Drone, Handphone, LCD Projector)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp5.595.000,00	Rp5.675.000,00	Rp5.700.000,00	Rp6.100.000,00	Rp5.900.000,00
X.XX.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung kantor dan bangunan lainnya	Pengadaan Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp2.238.000,00	Rp2.270.000,00	Rp2.280.000,00	Rp2.440.000,00	Rp2.360.000,00
X.XX.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp1.119.000,00	Rp1.135.000,00	Rp1.140.000,00	Rp1.220.000,00	Rp1.180.000,00
X.XX.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Pengadaan sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	OUTPUT SUB KEGIATAN (AKTIVITAS)	Pekerjaan Kelurahan	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	VARIABEL PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB (KASI/KASUBAG)	BASELINE 2024	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Disediakan													
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
										Rp4.000.000,00	Rp4.100.000,00	Rp4.200.000,00	Rp4.300.000,00	Rp4.200.000,00
X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Materai	Belanja Materai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp9.646.800,00	Rp9.647.400,00	Rp9.789.300,00	Rp10.476.000,00	Rp10.101.000,00
X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Belanja langganan Listrik, Air dan Internet (termasuk sewa aplikasi canva, drive dll)	Belanja langganan Listrik, Air dan Internet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp5.000.000,00	Rp5.100.000,00	Rp5.200.000,00	Rp5.300.000,00	Rp5.200.000,00
X.XX.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp13.509.200,00	Rp13.310.600,00	Rp13.441.700,00	Rp14.844.000,00	Rp14.169.000,00
X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	belanja jasa pelaksana transaksi keuangan, honor non ASN, belanja jasa tenaga administrasi, belanja jasa tenaga keamanan	belanja jasa pelaksana transaksi keuangan, honor nonASN, belanja jasa tenaga administrasi, belanja jasa tenaga keamanan, belanja jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	OUTPUT SUB KEGIATAN (AKTIVITAS)	Pekerjaan Kelurahan	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	VARIABEL PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB (KASI/KASUBAG)	BASELINE 2024	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
			tenaga kebersihan											
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
										Rp6.149.317,77	Rp6.348.802,21	Rp6.222.314,17	Rp6.656.739,24	Rp6.406.194,60
X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pajak dan Perizinannya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pajak dan Perizinannya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp768.664,72	Rp793.600,28	Rp777.789,27	Rp832.092,41	Rp800.774,33
X.XX.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp1.537.329,44	Rp1.587.200,55	Rp1.555.578,54	Rp1.664.184,81	Rp1.601.548,65
X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp2.305.994,16	Rp2.380.800,83	Rp2.333.367,81	Rp2.496.277,22	Rp2.402.322,98

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	OUTPUT SUB KEGIATAN (AKTIVITAS)	Pekerjaan Kelurahan	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	VARIABEL PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB (KASI/KASUBAG)	BASELINE 2024	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp3.074.658,88	Rp3.174.401,11	Rp3.111.157,09	Rp3.328.369,62	Rp3.203.097,30
X.XX.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Sarpras Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan Sarpras Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
										Rp1.537.329,44	Rp1.587.200,55	Rp1.555.578,54	Rp1.664.184,81	Rp1.601.548,65
X.XX.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Sarpras Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan Sarpras Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			SEKRETARIAT		90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00

4.2 Program Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD,dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2

Daftar kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Output	PIC
1	Fasilitasi dan Koordinasi Koperasi Merah Putih	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Koperasi Merah Putih	Ekbang
2	Penanganan Kemiskinan Dan Stunting Terintegrasi	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Penanganan Stunting (TPPS, Rakor linsek, monev)	Kesos
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rakor Kemiskinan, Fasilitasi TKPK, Monitoring dan Evaluasi penanganan kemiskinan	Kesos
3	Koordinasi Program Pembelajaran Daring Non Formal (Pendidikan Kesetaraan) Usia 25-30 Tahun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Wajib Belajar 13 tahun	Kesos
4	Pemenuhan Layanan Publik Yang Inklusif	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain	Layanan Administrasi Kependudukan (jemput bola)	Paten

No	Program Prioritas	Outcome	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Output	PIC
					yang Dilimpahkan		
5	Implementasi Prinsip Kabupaten Wonosobo Ramah HAM pada pelaksanaan program dan kegiatan di kecamatn	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-Fasilitasi Wajib Belajar 13 tahun - Fasilitasi penanganan masalah sosial kemasyarakatan - Fasilitasi Lomba Pemberdayaan Masyarakat - Fasilitasi Porkab - Fasilitasi Penanganan Disabilitas - Kampung KB - fasilitasi Festival anak soleh indonesia - fasilitasi lomba mtq - fasilitasi Lomba masjid - Fasilitasi Penanganan - Kenakalan Remaja - Fasilitasi Penanganan Pernikahan Anak - Fasilitasi Desa Siaga - pembinaan ODF - Pembinaan UKS - Pembinaan Perpustakaan - fasilitasi forum kesehatan desa - Pembinaan karang taruna	Kesos
6	Koordinasi Satu Data Wonosobo di tingkat kewilayahan	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Fasilitasi penunjang satu data (Internet dll)	Sekretariat

No	Program Prioritas	Outcome	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Output	PIC
7	Koordinasi Pengelolaan Sampah di tingkat Desa/Kelurahan berbasis Reduce-Reuse-Recycle (3R)	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pengelolaan Sampah di tingkat Desa/Kelurahan berbasis Reduce-Reuse-Recycle (3R)	Ekbang
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	fasilitasi penyusunan APBDes, pembinaan penatausahaan keuangan dan tatakelola aset desa	Pemerintahan

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 4.3
IKU Kecamatan Leksono

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran Daerah dan PD/ Program Nomenklatur)	Satuan Indikator Kinerja	CAPAIAN	TARGET						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran Daerah dan PD/ Program Nomenklatur)	Satuan Indikator Kinerja	CAPAIAN	TARGET						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1. Mengkoordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Pelayanan Umum 3. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 4. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah 6. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum 7. Membina dan Mengawasi penyelenggaraan	Persentase Pelimpahan Kewenangan Daerah di Kecamatan yang dilaksanakan Kecamatan	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	93,05	93,3	93,55	93,90	94,30	94,70	95,25	
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Angka	35,13	35,50	36	36,30	36,50	37,00	37,30	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran Daerah dan PD/ Program Nomenklatur)	Satuan Indikator Kinerja	CAPAIAN	TARGET						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
pemerintahan Desa										
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	72,76	65,96	66	68	70	73	75	

Untuk merealisasi target indikator kinerja dapat dicapai dengan formulasi/rumus indikator sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM (Nilai)
   IKM = Survey kepuasan masyarakat pada perangkat daerah
   Berdasarkan Perbup Nomor 18 Tahun 2023 Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Pengolahan data hasil survei mengacu pada pengukuran menggunakan Skala Likert. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$Bobot\ nilai\ rata-rata\ tertimbang = \frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Unsur} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur
Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$Bobot\ nilai\ rata-rata\ tertimbang = \frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Unsur} = \frac{1}{9} = 0{,}11$$

untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{Total\ dari\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Unsur}{Total\ Unsur\ yang\ Terisi}\ x\ Nilai\ Penimbang$$

untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM\ Unit\ Pelayanan\ x\ 25$$

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,000 - 2,599	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,600 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,064 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,532 - 4,000	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur).

2. Persentase kelimpahan daerah di Kecamatan yang dilaksanakan Kecamatan
   Urusan pemerintahan atau jenis pelayanan yang kewenangannya telah dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dan telah dilaksanakan secara penuh sesuai dengan regulasi yang berlaku

4.3.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan (Permendagri No 18 Tahun 2020 Pasal 1).

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran Daerah dan PD/ Program Nomenklatur)	Satuan Indikator Kinerja	CAPAIAN	TARGET						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah	Angka	N/A	90.00	90.50	91.00	91.50	92.00	92.50	
2	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	72.76	65.96	66	68	70	73	75	
3	Persentase aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
4	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
5	Persentase keterisian data statistik sektoral	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
6	Nilai hasil pengawasan kearsipan	Angka	N/A	65.76	68	69	70	72	74	
7	Persentase keselarasan program perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Angka	93.05	93.30	93.55	93.90	94.30	94.70	95.25	

No	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran Daerah dan PD/ Program Nomenklatur)	Satuan Indikator Kinerja	CAPAIAN	TARGET						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
9	Persentase Keselarasan usulan di Musyawarah Desa dan Kelurahan dengan Prioritas Daerah	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
10	Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Stunting sesuai tata waktu yang ditentukan	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
11	Persentase Kelengkapan Data Pelaporan Intervensi Kemiskinan Sesuai Tata Waktu yang ditentukan	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
12	Persentase Desa yang Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Kemiskinan Tepat Waktu	%	N/A	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	
13	Persentase Perempuan dan Masyarakat Rentan yang terlibat aktif dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Kelurahan	%	N/A	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
14	Persentase Desa dan Kelurahan yang mengalokasikan dana untuk penanganan permasalahan daerah (kemiskinan, pendidikan,	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

No	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran Daerah dan PD/ Program Nomenklatur)	Satuan Indikator Kinerja	CAPAIAN	TARGET						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	stunting, kelompok rentan)									
15	Persentase Keterwakilan Unsur Agama dan Kepercayaan Dalam Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
16	Persentase Koordinasi Kejadian Kebencanaan	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
17	Persentase Monitoring Evaluasi Antisipasi Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
18	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaporkan	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
19	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
20	Persentase desa yang menyelesaikan Pelaporan APBDes Tepat Waktu	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
21	Persentase Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Desa yang sudah	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

No	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran Daerah dan PD/ Program Nomenklatur)	Satuan Indikator Kinerja	CAPAIAN	TARGET						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	terselenggara									
22	Persentase Kesesuaian Realiasasi Anggaran dan Pelaksanaan APBDes	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
23	Persentase keselarasan Perencanaan Desa dengan prioritas Daerah	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Leksono Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Leksono dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Kecamatan Leksono menyajikan agenda utama perencanaan program yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya.

Penyusunan Renstra Kecamatan Leksono dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2025. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Kecamatan Leksono Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

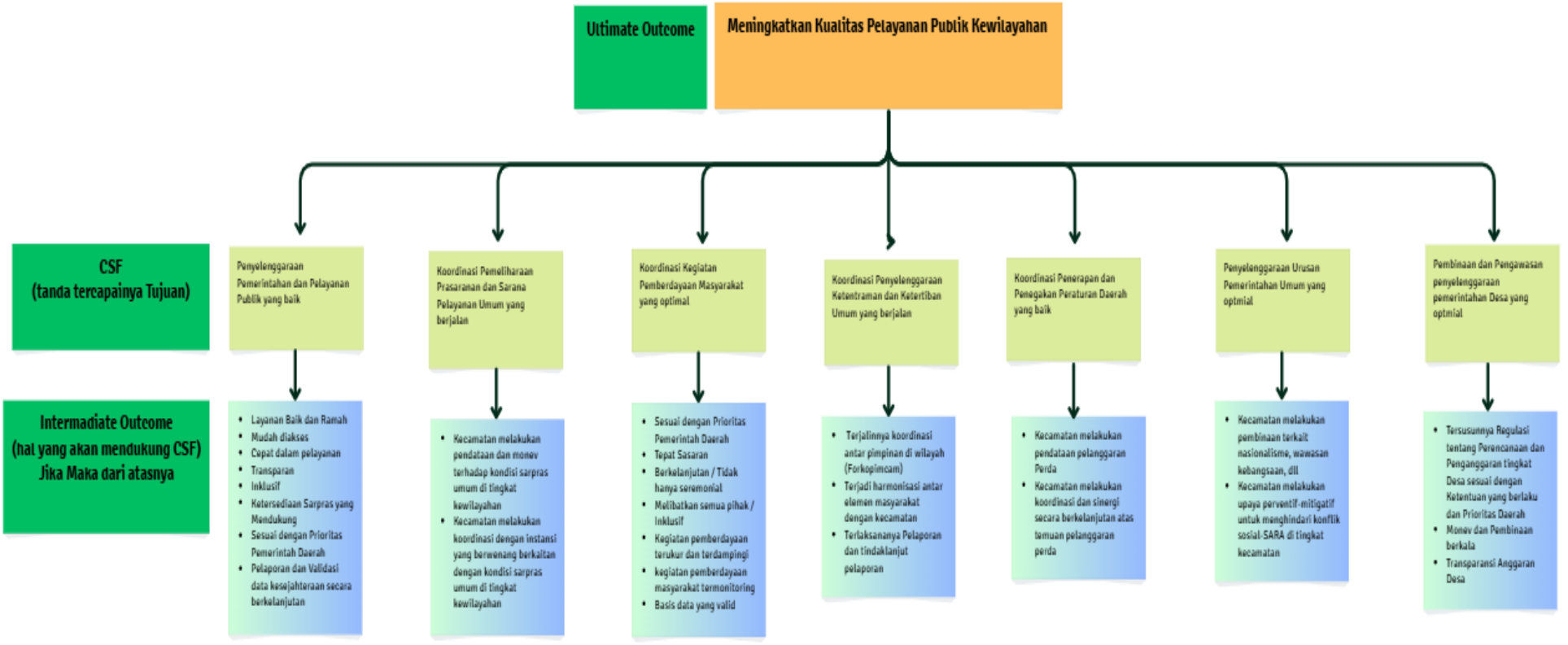
1. Setiap seksi pada Kecamatan Leksono agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh ASN pada setiap seksi di Kecamatan Leksono dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Leksono yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Wonosobo, 20 September 2025
Camat Leksono

NGADENAN HADI PRIYONO,S.Sos.
Pembina Tk I / IVb
NIP. 19680323 199103 1 009

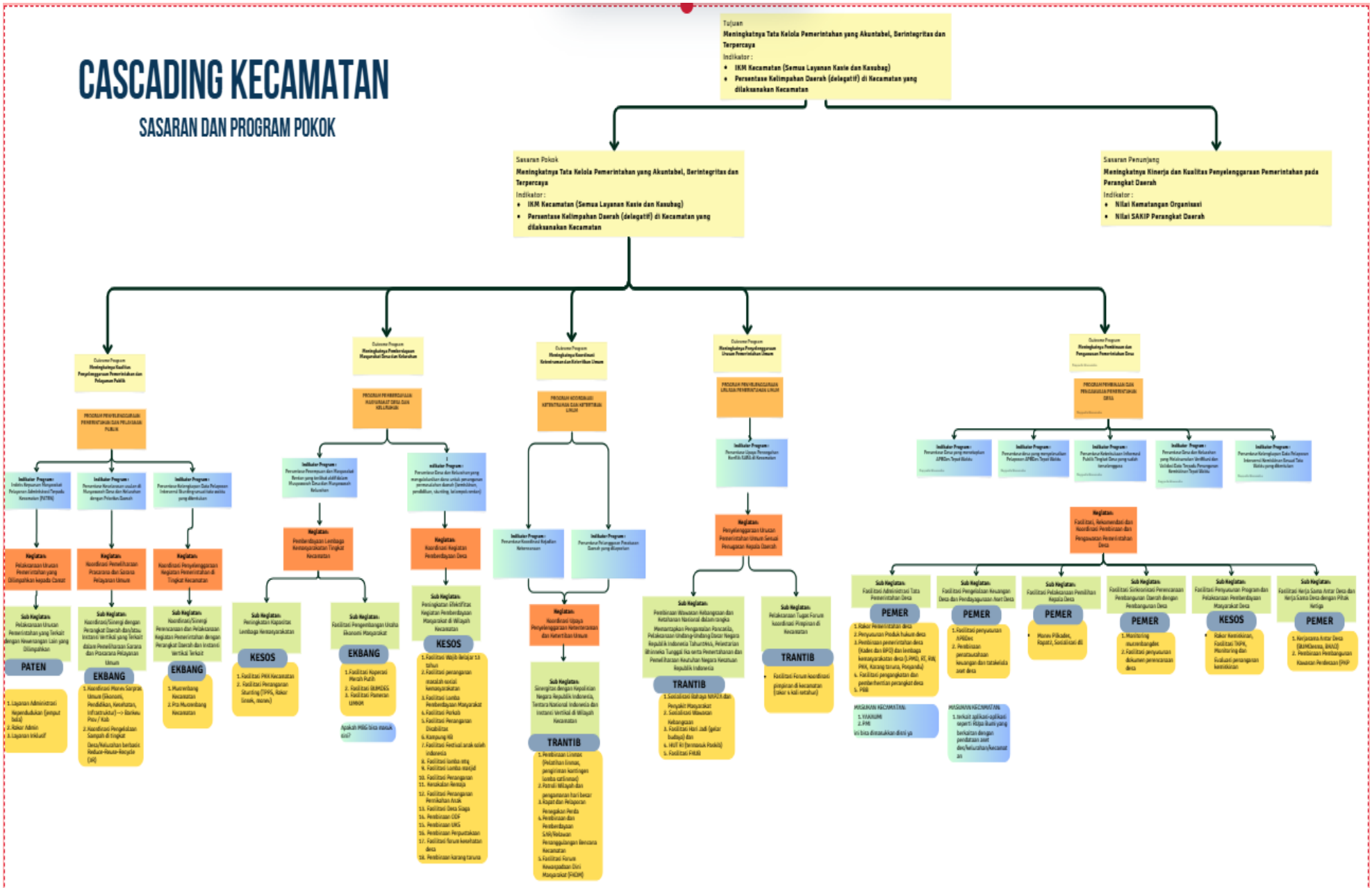
LAMPIRAN

POHON KINERJA KECAMATAN



CASCADING KECAMATAN

SASARAN DAN PROGRAM POKOK



CASCADING KECAMATAN

SASARAN DAN PROGRAM PENUNJANG

